



# Rencana Kerja Akhir KOMPAK

2021-2022



# Rencana Kerja Akhir KOMPAK

---

2021-2022

# DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif .....	v
Ikhtisar .....	1
Arah dan Kerangka Kerja Strategis .....	1
Fokus Geografis .....	6
Anggaran 2021–2022 .....	7
Konteks dan Kinerja Lampau .....	8
Konteks Operasional .....	8
Situasi Politik dan Ekonomi .....	8
Situasi Fiskal .....	10
Refleksi Kinerja KOMPAK .....	11
Kemitraan, Tata Kelola Program, dan Pengelolaan Kinerja .....	12
Kemitraan dan Koordinasi .....	12
Tata Kelola Program dan Pengawasan Strategis .....	13
Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja .....	14
01. Pengelolaan Keuangan Publik .....	16
02. Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) .....	26
03. Penguatan Kecamatan dan Desa .....	32
04. Sistem Informasi Desa .....	39
05. Akuntabilitas Sosial .....	45
06. Pengembangan Ekonomi Lokal .....	50
07. Lintas Sektor .....	55
Lampiran: Komponen Rencana Kerja Tahunan .....	64

# KATA PENGANTAR

Australia dan Indonesia memiliki sejarah panjang kerjasama dan kemitraan pembangunan, termasuk melalui program KOMPAK. Kerja sama kami untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan menjadi bahkan lebih penting lagi saat ini karena pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam penyediaan layanan dan juga berdampak signifikan terhadap kesehatan, ekonomi kelompok dan individu, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kekuatan kemitraan dan komitmen bersama kami dalam mendukung masyarakat miskin dan rentan untuk dapat mengakses layanan dasar dan kesempatan ekonomi inilah yang akan membantu kita melewati ujian serta masa-masa sulit ini.

Saya sangat bangga dengan pencapaian KOMPAK selama enam tahun terakhir beserta rencana kerjanya, sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, untuk memastikan setelah program berakhir pada Juni 2022, dampak dari kerja-kerja KOMPAK akan terus berlanjut untuk waktu yang lama.

Sejak awal tahun 2014, KOMPAK telah bekerja dengan Pemerintahan Indonesia sebagai mitra untuk menguji cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dasar. KOMPAK telah melakukan ini di 7 provinsi dan 24 kabupaten di seluruh Indonesia. Pada pertengahan 2020, kami meminta sebuah tim ahli independen untuk menjawab pertanyaan apakah KOMPAK telah mencapai apa yang dimintakan kepada mereka - dan jawabannya adalah 'ya, benar sekali'. Tim tersebut menilai bahwa KOMPAK telah berada di jalur yang benar dalam memberikan dukungan – dan hasil – yang efektif terhadap peningkatan layanan dasar, kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi. Para ahli itu juga menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 tidak menghentikan KOMPAK dalam melakukan pekerjaan atau untuk mencapai tujuannya - bahkan pada kenyataannya, KOMPAK dan para mitra telah bekerja keras dalam memastikan pemberian layanan esensial tetap dipertahankan, dan pembelajaran dari KOMPAK dipakai dalam menginformasikan dan mendukung respon pemerintah dan menjadikannya lebih efektif.

Program KOMPAK akan berakhir pada Juni 2022. Artinya, 18 bulan mendatang akan menjadi masa kritis memastikan bahwa model dan praktik terbaik KOMPAK dapat diterima dalam sistem pemerintah dan terus berlanjut untuk memberikan dampak positif pada pemberian layanan dalam tahun-tahun mendatang. Rencana Kerja 2021-2022 ini, yang merupakan hasil dari diskusi dan konsultasi yang panjang dengan mitra di pemerintah tingkat daerah dan pusat bersama dengan organisasi kemasyarakatan, akan membantu KOMPAK dan memastikan pencapaiannya berkelanjutan. Rencana Kerja berfokus pada enam kegiatan unggulan dengan target yang jelas. Ini akan membantu kami mendukung Pemerintah Indonesia dan mitra organisasi kemasyarakatan untuk mempertahankan pemberian layanan yang efektif dan untuk merespon COVID-19. Ini juga akan membantu Pemerintah Indonesia dalam mengambil pelajaran serta praktik baik yang telah diidentifikasi KOMPAK dan selanjutnya menerapkannya di seluruh Indonesia dengan cara-cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal yang berbeda-beda.

Kemitraan menjadi inti kesuksesan KOMPAK hingga saat ini, dan akan terus menjadi fokus hingga 18 bulan ke depan. Saya sangat berterima kasih atas kerja sama, keterlibatan, dan komitmen yang ditunjukkan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah sebagai mitra kami. Saya berharap, seperti nama KOMPAK, kita dapat melanjutkan kolaborasi ini, bekerja sama untuk memastikan bahwa kerja-kerja KOMPAK dapat terus berlanjut hingga di masa mendatang.

**Kirsten Bishop**

Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kedutaan Besar Australia

# KATA PENGANTAR

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 juga berdampak buruk pada perekonomian Indonesia serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Seiring perlambatan ekonomi dan pembatasan sosial yang diberlakukan sejak Maret 2020, banyak masyarakat Indonesia kehilangan mata pencaharian, sedangkan akses ke layanan dasar yang berkualitas semakin terbatas. Sebagai langkah penanggulangan, Pemerintah Indonesia menggulirkan berbagai kebijakan yang ditujukan tidak hanya untuk memitigasi penyebaran virus COVID-19, tetapi juga meminimalisasi dampak krisis terhadap kelompok masyarakat paling miskin dan rentan di Indonesia. Untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mengurangi dampak krisis, khususnya pada masyarakat miskin dan rentan, pendekatan yang inovatif dan kolaboratif penting untuk diterapkan, termasuk melalui program-program kemitraan antara Indonesia dan Australia seperti KOMPAK.

Jelas terlihat bahwa pengalaman KOMPAK sangat relevan dalam mendukung upaya Pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. Sejak 2015, KOMPAK telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan tata kelola layanan dasar di semua tingkat. Pada 2020, KOMPAK menyesuaikan rencana kerjanya dengan memanfaatkan proyek-proyek uji coba dan intervensi yang ada untuk membantu upaya Pemerintah memitigasi dampak pandemi. KOMPAK berfokus pada kegiatan terkait tata kelola desa, sistem informasi desa, dan administrasi kependudukan untuk meningkatkan pengumpulan data dan penjangkauan masyarakat miskin dan rentan yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Dukungan KOMPAK telah membantu meningkatkan kualitas data untuk menentukan target dan menyalurkan berbagai program bantuan sosial dengan cepat, akurat, sekaligus efektif.

Untuk jangka panjang, model KOMPAK beserta pembelajaran yang dipetik dari sana akan berkontribusi terhadap pencapaian sejumlah target dan agenda pembangunan yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Kerja 2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. KOMPAK mendukung rencana Pemerintah untuk mereformasi sistem perlindungan sosial melalui pengembangan Digitalisasi Monografi Desa (*Digitalized Village Monographs*). Terkait pembangunan ekonomi, KOMPAK mendukung Pemerintah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan adil dengan menerapkan pendekatan Keperantaraan Pasar. Selain itu, kegiatan-kegiatan KOMPAK juga bertujuan memperkuat tata kelola kecamatan dan desa, sekaligus mengembangkan mekanisme akuntabilitas sosial. Upaya-upaya KOMPAK ini telah berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan inklusif sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Saat ini KOMPAK telah menyusun Rencana Kerja untuk 2021–2022, yaitu rencana kerja terakhir sebelum program KOMPAK berakhir pada Juni 2022. Untuk periode Januari 2021 hingga Juni 2022, KOMPAK akan fokus pada pelembagaan dan keberlanjutan model-model serta praktik-praktik terbaiknya, sekaligus terus membantu Pemerintah seefektif mungkin memitigasi dampak krisis COVID-19. Dengan demikian, kami berharap para mitra pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan desa bersedia mendukung KOMPAK dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk melanjutkan implementasi model-model relevan dan efektif yang dipelopori KOMPAK. Selain itu, KOMPAK perlu memastikan diberlakukannya komunikasi dan mekanisme pertukaran pengetahuan yang efektif agar replikasi praktik-praktik terbaik KOMPAK di area-area lain, termasuk di tingkat nasional, dapat terlaksana.

## **Pungky Sumadi**

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana kerja kami bertujuan membantu pemerintah daerah menjadi lebih kuat dan inklusif. Agenda ambisius yang kami rumuskan ditargetkan untuk memperkuat kapasitas dan instrumen yang tersedia bagi pemerintah daerah—khususnya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa—sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien serta memperluas peluang ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

Rencana kerja akhir KOMPAK ini, yang meliputi periode Januari 2021 hingga Juni 2022, bertujuan meninggalkan warisan berupa diterapkannya sejumlah model dan pendekatan KOMPAK yang paling sukses pada sistem Pemerintahan Indonesia, yang diharapkan akan bertahan hingga bertahun-tahun. Aktivitas kami didasarkan pada keberhasilan implementasi, uji coba, serta pembelajaran selama enam tahun terakhir, dan membuka jalan untuk penghentian pemberian bantuan secara bertahap.

Periode ini penting untuk memastikan keberlanjutan investasi Pemerintah Australia pada KOMPAK setelah berakhirnya program. Rencana Keberlanjutan KOMPAK menjadi acuan pengembangan rencana kerja ini dan akan berfungsi sebagai strategi umum untuk mengintegrasikan perencanaan, pemantauan, dan refleksi mengenai bentuk kesuksesan dan keberlanjutan bagi KOMPAK dan mitra pemerintahnya.

Memasuki 2021, kondisi yang penuh ketidakpastian agaknya akan terus berlanjut. Penanggulangan dan pemulihan COVID-19 akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. KOMPAK berada di posisi yang tepat untuk mendukung upaya-upaya tersebut, sekaligus menerapkan model yang telah terbukti beserta perubahan yang dihasilkannya pada kebijakan, sistem, dan sumber daya pemerintah.

## PENANGGULANGAN COVID-19

Pandemi COVID-19 mengakibatkan sasaran dan rencana KOMPAK terancam gagal. Sejumlah kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia dengan sewajarnya mengalihkan fokus mereka ke upaya dan sumber daya penanggulangan. KOMPAK langsung merombak rencana agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan prioritas kementerian dan pemerintah daerah yang terus berubah, sekaligus mempertahankan kekuatan inti dan program unggulan. Setelah misi yang terlaksana pada November 2020, Tim Penasihat Strategis Independen (Independent Strategic Advisory Team/ISAT) menyimpulkan:

“KOMPAK berhasil menangani situasi pandemi yang sulit ini dengan baik, dengan memanfaatkan perombakan rencana yang difokuskan pada COVID untuk menyoroti kelebihan investasi unggulannya. Aksi penanggulangan terhadap pandemi yang dilakukan KOMPAK tepat waktu, terarah, dan efektif. Tantangan untuk 18 bulan selanjutnya adalah memastikan keberhasilan yang diperoleh tahun ini dapat diwujudkan menjadi perbaikan jangka panjang tata kelola di tingkat daerah. Untuk mencapainya, diperlukan analisis dan evaluasi tepat waktu atas pekerjaan yang telah dilakukan selama krisis untuk dijadikan bukti yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan berikutnya.”



Banyak praktik terbaik KOMPAK yang kini semakin relevan dan bermanfaat bagi upaya penanggulangan dan pemulihan pandemi oleh pemerintah. Misalnya, hasil kerja KOMPAK pada sistem informasi di desa menawarkan solusi praktis bagi pemerintah untuk mengidentifikasi pihak yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat program bantuan sosial yang diperluas. Contoh sukses serupa juga ditemukan dalam layanan penjangkauan pencatatan sipil, instrumen pengelolaan keuangan publik (PFM), keperantaraan pasar, dan analisis kelompok rentan.

Pandemi dan keterbatasan lingkungan kerja sepertinya akan terus berlanjut selama 2021. Oleh karena itu, rencana kerja ini disusun berdasarkan skenario bahwa pembatasan sosial dan perjalanan (seperti bekerja dari rumah) diberlakukan sepanjang semester pertama 2021. Setelahnya, KOMPAK akan menggunakan asumsi adanya pelunasan pembatasan yang memungkinkan penyelenggaraan lokakarya, pelatihan, dan acara-acara lain. Seluruh aktivitas KOMPAK akan mengacu kepada peraturan nasional dan daerah, serta kebijakan korporat DFAT dan Abt.

## KEMITRAAN DAN PENDEKATAN PENYELENGGARAAN

Di tingkat nasional, KOMPAK mendukung dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada empat kementerian: Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dan Kementerian Keuangan. Keempat kementerian ini akan menjadi mitra penting dalam perluasan dan pelembagaan pendekatan KOMPAK. Di tingkat daerah, KOMPAK akan terus menargetkan 24 kabupaten di tujuh provinsi. Tujuannya adalah menciptakan perubahan berkelanjutan di tingkat kabupaten dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan sebagai pusat strategi KOMPAK.

Aktivitas KOMPAK, baik di tingkat nasional maupun daerah, menempatkannya di posisi yang unik untuk memengaruhi kebijakan nasional sekaligus membantu pemerintah daerah menerapkan kebijakan tersebut. Bantuan teknis di tingkat nasional dan provinsi terutama akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan pembelajaran praktis yang diperoleh dari penerapan di tingkat daerah.

KOMPAK juga akan berupaya meningkatkan integrasi dan sinergi antara program unggulan dengan program lain yang didukung DFAT. Semakin mendekati akhir program, sumber daya yang lebih besar akan dialokasikan kepada riset dan analitik, komunikasi, dan pengelolaan pengetahuan untuk mendukung dokumentasi serta sosialisasi hasil dan pengaruh pada keputusan kebijakan pemerintah dan rancangan program.

## MEMPRIORITASKAN PROGRAM UNGGULAN

KOMPAK memiliki enam program unggulan yang diprioritaskan pada bidang-bidang keahlian KOMPAK yang telah terbukti dan diyakini memiliki dampak berkelanjutan. KOMPAK akan terus mendukung upaya penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah pada keenam bidang unggulan ini, sekaligus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pelembagaan model dan praktik terbaik KOMPAK.

## PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

Selama lebih dari lima tahun, KOMPAK membantu pemerintah pusat memperbaiki kebijakan transfer fiskal serta membantu pemerintah kabupaten dan desa memperbaiki pemanfaatan anggaran.

Pada 2022 nanti, KOMPAK menargetkan pelembagaan mekanisme yang meningkatkan ketepatan waktu serta kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pengeluaran pemerintah daerah. Ini akan dicapai melalui penerapan instrumen PFM—berupa perangkat lunak analisis kemiskinan dan perencanaan (SEPAKAT<sup>1</sup>), standar layanan minimum, dan analisis keterbatasan anggaran—serta melalui penggunaan transfer fiskal—khususnya Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus/Otsus—yang efektif.

KOMPAK juga akan lebih fokus membantu Papua dan Papua Barat memperkuat pengelolaan keuangan dan pemanfaatan Dana Otsus, yang meliputi dukungan terhadap kedua pemerintah provinsi ini agar dapat menyelenggarakan program perlindungan sosial yang efektif, efisien, dan inklusif (termasuk BANGGA Papua dan pengembangan program baru di Papua Barat) secara mandiri.

Selain itu, KOMPAK akan membantu Kementerian Keuangan meluncurkan insentif berbasis kinerja untuk desa dengan memanfaatkan pembelajaran dan bukti efektivitas yang diperoleh dari uji coba kami.

## PENGUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN STATISTIK HAYATI (PASH)

Selama lima tahun terakhir, KOMPAK telah membantu pemerintah memperkuat sistem PASH di semua tingkat, termasuk desa, sehingga dokumen kependudukan dan data kependudukan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat.

Pada 2022 nanti, KOMPAK menargetkan pelembagaan model layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa (LABKD<sup>2</sup>) di lokasi sasaran agar selanjutnya dapat dijadikan sebagai model bagi area-area perdesaan di seluruh Indonesia. KOMPAK akan fokus pada peningkatan integrasi layanan PASH: dimulai dengan antar kabupaten, kecamatan, dan desa, kemudian berlanjut dengan sistem informasi desa serta basis data kemiskinan nasional dan PASH (khususnya sebagai mekanisme untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data DTKS<sup>3</sup> serta basis data PASH [SIAK]<sup>4</sup>).

## PENGUATAN KECAMATAN DAN DESA

Seiring semakin meningkatnya ketersediaan sumber daya bagi pemerintah desa dan kian rumitnya iklim kebijakan, banyak pemerintah desa yang tidak mampu mempersiapkan rencana, anggaran, dan laporan keuangan secara efektif, maupun menyelenggarakan layanan dasar yang efektif dan inklusif. Hal ini makin diperparah oleh pandemi COVID-19. Pendekatan KOMPAK berupa penguatan kecamatan dan dukungan kepala desa akan membantu upaya penanggulangan COVID-19 serta efektivitas jangka panjang dari tata kelola desa.

Pada 2022 nanti, KOMPAK menargetkan pelembagaan model tata kelola desa (PTPD/PbMAD<sup>5</sup>) di lokasi sasaran agar selanjutnya dapat dikembangkan secara nasional sebagai bagian dari Program P3PD<sup>6</sup> Bank Dunia-Pemerintah Indonesia. Ini meliputi mekanisme bagi kecamatan agar lebih berperan aktif dan efektif dalam mengoordinasikan dan mendukung penyelenggaraan layanan dasar, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pengembangan ekonomi lokal.

<sup>1</sup> Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT).

<sup>2</sup> Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD).

<sup>3</sup> Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

<sup>4</sup> Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

<sup>5</sup> Ini meliputi model Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dan Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD).

<sup>6</sup> Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) adalah proyek senilai US\$300 juta yang dikelola Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia untuk membangun kapasitas pemerintah desa di 350 dari 416 kabupaten Indonesia.

KOMPAK juga menargetkan penerapan sistem—khususnya model Musyawarah Khusus—dalam proses perencanaan dan penganggaran desa untuk meningkatkan partisipasi serta aspirasi perempuan dan kelompok rentan. Penerapan sistem ini akan dilengkapi dukungan untuk membantu desa menghasilkan anggaran dan laporan pengeluaran berkualitas yang memprioritaskan layanan dasar.

Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK menargetkan terbentuknya pendekatan perencanaan dan kerja sama pemerintah daerah yang kuat. Ini akan dicapai melalui peluncuran awal program tata kelola daerah, yaitu DMMD<sup>7</sup> dan PROSPPEK<sup>8</sup>.

## SISTEM INFORMASI DESA

Sistem informasi desa terbukti merupakan instrumen penting dalam upaya penanggulangan COVID-19 dan penyelenggaraan layanan dasar. Pemerintah desa dan, pada gilirannya, pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, memerlukan data akurat agar dapat menyelenggarakan program bantuan sosial, kesehatan, dan pemulihan ekonomi secara efektif.

Pada 2022 nanti, KOMPAK menargetkan pelembagaan sistem informasi desa pada semua desa di area-area target, agar selanjutnya dapat direplikasi oleh semua provinsi (termasuk di luar area target KOMPAK). Fokus yang lebih kuat akan diberikan pada peningkatan pemanfaatan sistem tersebut, khususnya untuk upaya penanggulangan COVID-19 (seperti identifikasi dan pemantauan penerima BLT-DD<sup>9</sup>), peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan (khususnya untuk kelompok rentan), dan untuk masalah khas setempat (seperti inisiatif untuk menurunkan angka anak putus sekolah). KOMPAK juga akan berupaya meningkatkan integrasi sistem-sistem tersebut dengan sistem data lainnya, sehingga membantu peningkatan kualitas data DTKS, SIAK, dan diharapkan juga data SEPAKAT.

Semua inisiatif ini akan digunakan untuk membantu Bappenas dalam hal perancangan dan peluncuran program Digital Monografi Desa (DMD), serta kemungkinan perluasannya secara nasional<sup>10</sup>.

## AKUNTABILITAS SOSIAL

Selama lima tahun terakhir, KOMPAK bekerja dengan pemerintah desa untuk menguji dan memperluas mekanisme akuntabilitas sosial. Kerja sama ini meliputi upaya peningkatan keahlian, peran, dan representasi Badan Permusyawaratan Desa, serta peningkatan transparansi dan mekanisme aspirasi bagi anggota masyarakat.

Pada 2022 nanti, KOMPAK menargetkan diterapkannya mekanisme untuk memastikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa aktif, efektif, dan akuntabel; termasuk di dalamnya membagikan dan melembagakan pembelajaran yang diperoleh dari uji coba Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan mekanisme umpan balik masyarakat (Posko Aspirasi) ke dalam kebijakan daerah dan nasional.

<sup>7</sup> Distrik Membangun, Membangun Distrik (program yang didanai Otsus di Kabupaten Jayapura, Papua)

<sup>8</sup> Program Strategis Pembangunan dan Pemberdayaan Kampung (program yang didanai Otsus di Papua Barat)

<sup>9</sup> Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

<sup>10</sup> DMD adalah kebijakan nasional yang dipimpin Bappenas—dengan mengintegrasikan pembelajaran yang diperoleh dari SID yang dikerjakan KOMPAK—untuk standardisasi dan perluasan penggunaan SID dalam pembaruan data kemiskinan dan metrik lainnya.

## PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Pemerintah Indonesia memprioritaskan pemulihan ekonomi sebagai salah satu tujuan politik utamanya. Ini membuka peluang bagi KOMPAK—melalui kemitraan dengan Bappenas—untuk mengoptimalkan model keperantaraan pasar dan menilai pendekatan mana yang paling efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan keuntungan bagi kelompok usaha kecil di tingkat desa.

Pada 2022 nanti, KOMPAK sudah akan memiliki hasil uji coba keperantaraan pasar yang dapat digunakan sebagai model untuk Bappenas. Ini meliputi dasar bukti yang kuat mengenai efektivitas model, khususnya dalam membantu membuka akses peluang ekonomi yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan. Elemen-elemen model yang terbukti sukses juga akan dilembagakan melalui kebijakan nasional, seperti Strategi Nasional Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## PENGELOLAAN KINERJA

Kinerja akan dinilai berdasarkan Kerangka Kerja Hasil KOMPAK (untuk memberikan gambaran strategis secara umum) serta target terkini yang spesifik, terukur, dan berbatas waktu untuk tiap komponen kegiatan unggulan. Ini akan membantu penilaian perkembangan menuju capaian akhir dan capaian antara KOMPAK, sekaligus menjadikan capaian target dan kebijakan yang pernah dicapai di awal program sebagai batu pijakan untuk pencapaian berikutnya. KOMPAK juga akan menitikberatkan pada pembagian pembelajaran yang diperoleh dan analisis reflektif melalui tinjauan kinerja dan acara eksternal, seperti konferensi tahunan untuk berbagi pengetahuan.

## ANGGARAN DAN ALUR WAKTU

Rencana kerja ini didasarkan pada anggaran sejumlah \$14,2 juta untuk 18 bulan. Pendanaan paling besar dianggarkan untuk Semester 1 2021, lalu secara bertahap dikurangi hingga akhir program. Anggaran untuk Januari hingga Juni 2021 disahkan melalui alokasi DFAT untuk Tahun Fiskal 2020/2021. Anggaran Tahun Fiskal 2021/2022 (Juli 2021 hingga 2022) akan disahkan pada Mei/Juni. Pada 2022 nanti, sebagian besar sumber daya akan dialokasikan pada evaluasi, pelaporan, dan penutupan program.

KOMPAK akan secara bertahap menghentikan aktivitas daerah hingga Desember 2021, kecuali di Papua dan Papua Barat, yang akan berlanjut hingga Maret 2022. Aktivitas nasional akan berhenti pada akhir Maret 2022, sedangkan KOMPAK akan ditutup pada Juni 2022.









# IKHTISAR

Rencana kerja akhir KOMPAK mencakup periode dari Januari 2021 hingga akhir program pada Juni 2022. Rencana ini dirancang untuk membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan layanan dasar dan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan rentan. Rencana ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024<sup>11</sup>) milik pemerintah serta program Pembangunan Indonesia DFAT di Indonesia, termasuk Rencana Penanggulangan Perkembangan COVID-19 di Indonesia milik DFAT. Gender dan inklusi sosial akan diarusutamakan ke dalam seluruh aktivitas untuk mendorong kesetaraan gender dan pembangunan inklusif. Selama 18 bulan ke depan, KOMPAK akan memperkuat fokusnya pada dukungan terhadap upaya penanggulangan dan pemulihan COVID-19 yang dilakukan pemerintah, serta memastikan keberlanjutan perubahan kunci, hasil, dan model yang telah teruji setelah KOMPAK berhenti beroperasi.

## ARAH DAN KERANGKA KERJA STRATEGIS

KOMPAK dipandu oleh kerangka kerja strategis tingkat tinggi yang menguraikan capaian akhir dan capaian antara, serta kerangka kerja hasil berdasarkan kegiatan unggulan. Kegiatan unggulan KOMPAK beserta aktivitas terkaitnya dipilih berdasarkan penilaian terhadap potensi dampak dan penggunaannya oleh pemerintah selama 18 bulan yang tersisa dari program.



<sup>11</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

## KOMPAK FLAGSHIPS

<p><b>1 Pengelolaan keuangan publik (PFM)</b> Menggunakan instrumen dan analisis PFM untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dasar</p>	<p><b>5 Akuntabilitas sosial</b> Memperkuat akuntabilitas sosial guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan</p>
<p><b>2 Penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati (PASH)</b> Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kelengkapan data kependudukan</p>	<p><b>6 Keperantaraan Pasar</b> Mendorong keperantaraan pasar untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal</p>
<p><b>3 Penguatan kecamatan dan desa</b> Menjadikan kecamatan dan desa sebagai platform untuk memperkuat pencapaian dalam penyelenggaraan layanan</p>	<p><b>7 Lintas sektor</b> Mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial, inovasi, serta riset dan analitik yang kuat</p>
<p><b>4 Sistem informasi desa</b> Mendorong pemanfaatan data perencanaan dan penganggaran</p>	<p><b>8 Penghentian bertahap</b> Secara bertahap menghentikan kegiatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang tidak secara langsung sejalan dengan prioritas kegiatan unggulan</p>

Struktur kegiatan unggulan—yang menjadi dasar pengembangan rencana kerja ini—menghasilkan keterhubungan yang lebih kuat antara kinerja dan implementasi program. Target yang ditentukan untuk tiap komponen kegiatan unggulan akan membantu pengukuran kemajuan terhadap hasil yang diharapkan. Kegiatan unggulan dan target ini dibangun berdasarkan sasaran KOMPAK Sukses 2022 dan memberikan cara yang lebih terkonsolidasi dan konkret untuk menyelenggarakan serta mengukur capaian kegiatan dan *outcomes*.

Bantuan teknis di tingkat nasional dan daerah terutama akan ditujukan kepada inisiatif pelembagaan model dan pendekatan KOMPAK yang berhasil ke dalam kebijakan dan program pemerintah. Ini meliputi pengesahan peraturan, pengamanan pendanaan yang tengah berjalan, pengembangan kebijakan dan panduan, alokasi sumber daya manusia, penerapan dan penyempurnaan sistem dan proses, serta pengembangan keahlian dan pengetahuan dalam ruang lingkup lembaga pemerintahan yang mengambil alih inisiatif.

Keenam kegiatan unggulan beserta komponen-komponennya diidentifikasi berdasarkan keunggulan komparatif KOMPAK. Pada November 2020, Tim Penasihat Strategis Independen (*Independent Strategic Advisory Team/ISAT*) mencatat bahwa “Penentuan kegiatan unggulan membantu membingkai pekerjaan KOMPAK sehingga mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan serta relevan terhadap upaya penanggulangan pandemi. Kegiatan unggulan juga siap diwujudkan sebagai tujuan capaian akhir pemberian bantuan.”

Rencana kerja ini ditopang oleh tiga strategi dan rencana besar KOMPAK, yaitu:

- **Rencana Keberlanjutan**,<sup>12</sup> yang akan berfungsi sebagai strategi utama dalam integrasi perencanaan, pemantauan, dan refleksi mengenai keberhasilan dan keberlanjutan bagi KOMPAK dan mitra pemerintahnya. Target dan indikator KOMPAK telah disesuaikan untuk akhir program dengan fokus pada tercapainya replikasi, penskalaan, dan keberlanjutan model dan pendekatan yang telah terbukti. Kajian kinerja menjadi mekanisme utama untuk menyempurnakan strategi tim dalam mempertahankan dan

<sup>12</sup> Rencana Keberlanjutan KOMPAK 2019–2022. Dapat diakses di: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/kompak-sustainability-plan-2019-2022>



mengukur kemajuan menuju perubahan kunci. Rencana kerja ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan KOMPAK untuk mengalihkan dukungan teknis dan pembiayaan yang secara bertahap akan dihentikan ke alternatif yang lebih berkelanjutan.

- **Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI),<sup>13</sup>** yang akan difokuskan pada pengarusutamaan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada, ketimbang menerapkan intervensi GESI secara khusus. Intervensi khusus, seperti Akademi Paradigta dan lainnya yang dikelola oleh PEKKA, mitra implementasi KOMPAK, telah berakhir dan diserahkan ke pemerintah pada 2020. Kegiatan-kegiatan GESI akan difokuskan pada pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai hambatan dan kondisi yang dihadapi perempuan miskin, penyandang disabilitas, serta kelompok tertinggal dan terpinggirkan dalam mengakses layanan di tingkat daerah, serta membantu pemerintah mengembangkan dan menerapkan solusi untuk mengatasi segala hambatan tersebut. Ini juga meliputi proses KOMPAK dalam menghasilkan, mengemas, dan mengkomunikasikan bukti, pembelajaran, dan pengetahuan tentang praktik GESI untuk dialog dengan pemerintah, serta replikasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan utama.
- **Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan,<sup>14</sup>** yang bertujuan mempercepat kepemilikan pemerintah terhadap model dukungan KOMPAK yang telah terbukti dengan memimpin kegiatan advokasi dan komunikasi di seluruh lokasi maupun di luar lokasi KOMPAK. Strategi ini menguraikan tiga pendekatan utama: memfokuskan dan menyelaraskan upaya advokasi keseluruhan KOMPAK di tingkat nasional dan daerah; mengembangkan atau mengemas ulang materi komunikasi dan dokumen teknis yang mendukung berbagai kegiatan advokasi yang ditujukan kepada beragam pemirsa sasaran; dan menjalin atau memperkuat hubungan strategis dengan sejumlah mitra kunci dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

### Prioritas Advokasi KOMPAK

KOMPAK akan memprioritaskan kegiatan advokasi nasional dan daerah menuju:

1. Optimalisasi transfer fiskal untuk mempercepat tercapainya Standar Layanan Minimum (Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri)
2. Memperluas cakupan layanan PASH di desa (Bappenas, Kemendagri, Kemendesa)
3. Meningkatkan pemanfaatan Dana Otsus untuk mempercepat pembangunan Papua (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat)
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan untuk meningkatkan layanan dasar serta pengembangan ekonomi lokal (Bappenas, Kemendagri)
5. Pemanfaatan sistem informasi desa untuk memperbarui data kelompok miskin dan rentan (termasuk penyandang disabilitas) pada DTKS dan memperkuat interoperabilitas dengan basis data PASH nasional (SIK) (Bappenas, Kemendagri, Kemendesa)
6. Memperkuat penganggaran, perencanaan, dan akuntabilitas sosial desa yang inklusif (Kemendesa)
7. Mengintegrasikan keberantaraan pasar ke dalam Strategi Nasional Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Bappenas)

<sup>13</sup> Strategi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial KOMPAK 2018–2022. Dapat diakses di: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/kompak-gender-equality-and-social-inclusion-strategy-2018-2022>

<sup>14</sup> Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan KOMPAK untuk Advokasi 2020. Dapat diakses di: <https://www.dropbox.com/s/369e0c50mepl36s/KOMPAK%20Communication%20and%20Knowledge%20Management%20Strategy%20for%20Advocacy%202020.pdf?dl=0>

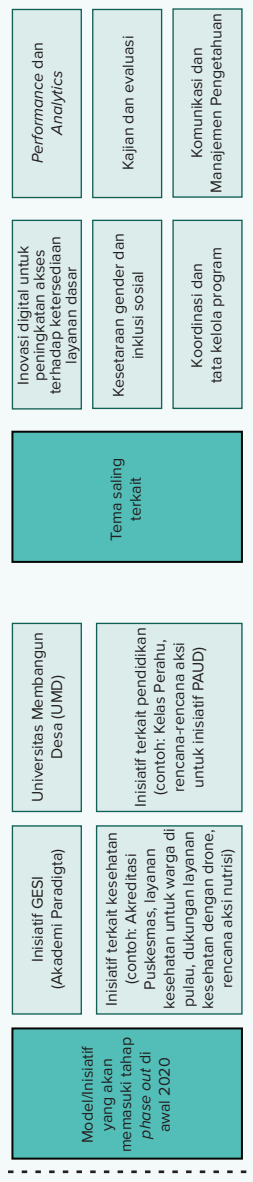
## Strategi Unggulan: Program Tata Kelola KOMPAK

<p>Instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik (PFM)</p>	<p>Pencatatan sipit dan statistik hayati yang inklusif dan akuntabel</p>	<p>Penguatan tata kelola kecamatan dan desa</p>	<p>Sistem informasi desa</p>	<p>Akuntabilitas sosial</p>	<p>Keperantaraan Pasar</p>
<p>Menggunakan instrumen dan analisis PFM untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar</p>	<p>Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen identitas hukum dan kelengkapan data penduduk</p>	<p>Menjadikan kecamatan dan desa sebagai pusat peningkatan kualitas layanan dasar</p>	<p>Meningkatkan penggunaan data desa untuk mendukung perencanaan dan penganggaran</p>	<p>Memperkuat akuntabilitas sosial untuk meningkatkan kualitas layanan dasar</p>	<p>Memperkuat akuntabilitas sosial untuk meningkatkan kualitas layanan dasar</p>
<p>Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menggunakan instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik untuk perencanaan dan penganggaran (SEPAKAT, Analisis Kendala, SPM)</p>	<p>Meningkatkan cakupan, kapasitas, pembiayaan lokal dan keterhubungan PASH berbasis desa dan kecamatan</p>	<p>Meningkatkan cakupan dan mendukung pelemagaan model tata kelola kecamatan dan desa (PTPD dan PbMAD)</p>	<p>Meningkatkan cakupan dan mendukung pelemagaan sistem informasi desa</p>	<p>Meningkatkan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme aspirasi, literasi anggaran dan mekanisme akuntabilitas sosial lainnya</p>	<p>Menyediakan implementasi dan dokumentasi uji coba model Keperantaraan Pasar</p>
<p>Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengakses dan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK Fisik, DAK Non-fisik dan DID) untuk mendukung penyediaan layanan dasar dan pelemagaan model-model KOMPAK</p>	<p>Meningkatkan kolaborasi lintas sektoral, terutama dengan unit layanan (contoh: klinik, rumah sakit dan sekolah) untuk mempercepat peningkatan cakupan PASH</p>	<p>Memperkuat peran koordinasi dan pendampingan oleh kecamatan untuk mendukung layanan dasar di desa</p>	<p>Meningkatkan penggunaan sistem informasi desa oleh desa untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan dan kegiatan lainnya</p>	<p>Memperkuat kebijakan, pedoman dan mode akuntabilitas sosial dan inklusi dalam pelaksanaan UU Desa di tingkat nasional dan daerah</p>	<p>Mengembangkan instrumen dan rekomendasi model bisnis nasional untuk mendukung keberlanjutan Keperantaraan Pasar</p>
<p>Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua, Papua Barat dan Aceh untuk mengimplementasikan kebijakan otonomi khusus</p>	<p>Menyusun dan memasukkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan layanan PASH bagi kelompok rentan (termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas dan orang yang terdampak keadaan darurat)</p>	<p>Memperkuat kapasitas desa dalam perencanaan dan penganggaran yang inklusif untuk memenuhi penyediaan layanan dasar</p>	<p>Mengintegrasikan sistem informasi desa dengan sistem informasi daerah lainnya (misalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK)</p>	<p>MITRA: Seknas Fira PEKKA BaKTI</p>	
<p>Membangun dan mendukung pelemagaan model insentif pembiayaan berbasis kinerja desa untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar</p>	<p>MITRA: PUKAPA LPA NTB</p>	<p>Mendukung perencanaan bersama dan kolaborasi antar kabupaten, kecamatan, desa dan unit layanan (klinik/sekolah) dalam penyediaan layanan dasar - UNTUK PROGRAM LANDASAN SAJA -</p>	<p>Mengembangkan dan menguji coba sistem informasi di kecamatan dan kabupaten</p>		

MITRA:  
BaKTI

MITRA:  
BaKTI

## Komponen lainnya dalam KOMPAK



## Apa yang dimaksud pelemagaan?

Proses menggabungkan inisiatif ke dalam sistem pemerintahan, antara lain melalui penetapan peraturan, pendanaan lanjutan, penyusunan kebijakan dan pedoman, instalasi aplikasi/sistem dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan staf lembaga yang mengambil alih inisiatif tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat KOMPAK Sustainability Plan 2019-2020.

## ALUR WAKTU DAN PENGAKHIRAN PROGRAM

KOMPAK sedang berada di masa 18 bulan terakhir operasinya. Kantor tingkat provinsi dijadwalkan tutup pada Maret 2022, sementara program dan kantor di tingkat nasional dijadwalkan berakhir pada Juni 2022. Sebagian besar pengeluaran dan intervensi akan difokuskan pada 2021, dan beralih ke serah terima serta penutupan operasi pada 2022.

### Tahap-tahap penting dalam rencana kerja akhir

2021	Q1	Tinjauan kinerja 2020 (Januari) Tenggat Laporan Tahunan 2020 (Februari)
	Q2	Misi Pengawasan Bersama (menunggu konfirmasi)
	Q3	Tinjauan kinerja enam bulanan 2021 (Juli) Tenggat Laporan Enam Bulanan 2021 (Agustus)
	Q4	Kegiatan tingkat daerah berakhir (Desember)
2022	Q1	Misi Pengawasan Bersama (menunggu konfirmasi) Tinjauan kinerja akhir (Januari) Kegiatan tingkat nasional berakhir (Februari) Konferensi Kerja Sama dan Inovasi Pengembangan Inspirasi (Februari) Kantor tingkat provinsi ditutup (Maret) Tenggat Laporan Tahunan 2021 (Maret)
	Q2	Tenggat Laporan Program Akhir (Mei) Kantor tingkat nasional ditutup (Juni) Program berakhir (Juni) Tinjauan independen terhadap KOMPAK (ditentukan dan diatur oleh DFAT)

## FOKUS GEOGRAFIS

KOMPAK akan memfokuskan kegiatan rencana kerja secara geografis di 24 kabupaten pada tujuh provinsi. Pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan akan berperan sebagai pusat strategi KOMPAK. Jika memungkinkan, kabupaten akan menjadi pusat terkumpulnya kegiatan yang hasilnya saling melengkapi. KOMPAK akan memprioritaskan bantuan untuk pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mereplikasi dan melembagakan model serta pendekatan. Di luar lokasi KOMPAK, cakupan replikasi bervariasi, bergantung pada tiap kegiatan unggulan dan model.

LOKASI KOMPAK: 7 Provinsi, 24 Kabupaten, 41 Kecamatan, 411 Desa

### PROVINSI DAN KABUPATEN KOMPAK



Nama provinsi	Nama kabupaten		Jumlah kecamatan	Jumlah desa
Aceh	Aceh Barat	●	1	6
	Bener Meriah	●	1	6
	Bireuen	●	1	6
Jawa Tengah	Brebes	●	1	12
	Pekalongan	●	1	9
	Pemalang	●	1	12
Jawa Timur	Bondowoso	●	2	28
	Lumajang	●	2	20
	Pacitan	●	2	27
	Trenggalek	●	2	20
NTB	Bima	●	2	29
	Lombok Timur	●	3	40
	Lombok Utara	●	2	13
	Sumbawa	●	2	20
Sulawesi Selatan	Bantaeng	●	1	10
	Pangkajene Kepulauan	●	1	7
Papua	Asmat	●	2	23
	Boven Digoel	●	1	5
	Jayapura	●	3	19
	Nabire	●	2	10
Papua Barat	Fakfak	●	2	15
	Kaimana	●	1	17
	Manokwari Selatan	●	3	34
	Sorong	●	2	23
Total Keseluruhan			41	411

## ANGGARAN 2021–2022

Rencana kerja ini menguraikan anggaran kegiatan KOMPAK sebesar \$14,2 juta<sup>15</sup> untuk 18 bulan mendatang. Anggaran ini didasarkan pada rencana penutupan kantor di tingkat daerah pada Maret 2022 serta kantor di tingkat nasional (dan program) pada Juni 2022. Rencana kerja ini didasarkan pada komitmen anggaran sebesar \$9,5 juta (untuk Januari–Juni 2021), dan alokasi lebih lanjut sebesar \$4,7 juta untuk 12 bulan terakhir (\$3,5 juta untuk Juli–Desember 2021; \$1,3 juta untuk Januari–Juni 2022).

Alokasi anggaran dari Juli 2021 ini adalah perkiraan anggaran untuk sisa program, dan dapat berubah. DFAT mengumumkan alokasi pendanaan per tahun fiskal, dan alokasi untuk Tahun Fiskal 2021/2022 diperkirakan akan diumumkan pada Juni 2021.

Selama dua tahun terakhir, KOMPAK telah menghabiskan 43–45% dari total pendanaannya untuk implementasi kegiatan langsung, yang meliputi bantuan teknis jangka pendek, hibah untuk mitra pelaksana, biaya logistik untuk acara, dan penyediaan. Selain itu, pengeluaran KOMPAK juga dialokasikan untuk personel jangka panjang (berdasarkan posisi pada struktur organisasi) beserta biaya terkait, baik yang terlibat dalam penerapan langsung kegiatan maupun pengelolaannya. Berdasarkan tren, total alokasi untuk Tahun Fiskal 2019/2020 (Juli 2019 hingga Juni 2020) adalah \$22,8 juta, sementara total alokasi untuk Tahun Fiskal 2020/2021 (Juli 2020 hingga Juni 2021) adalah \$23,0 juta.

### Anggaran KOMPAK untuk Rencana Kerja Akhir (Januari 2021 hingga Juni 2022)

#### RINGKASAN

**\$14,2 JUTA**

Total anggaran kegiatan dari Januari 2021 hingga Juni 2022

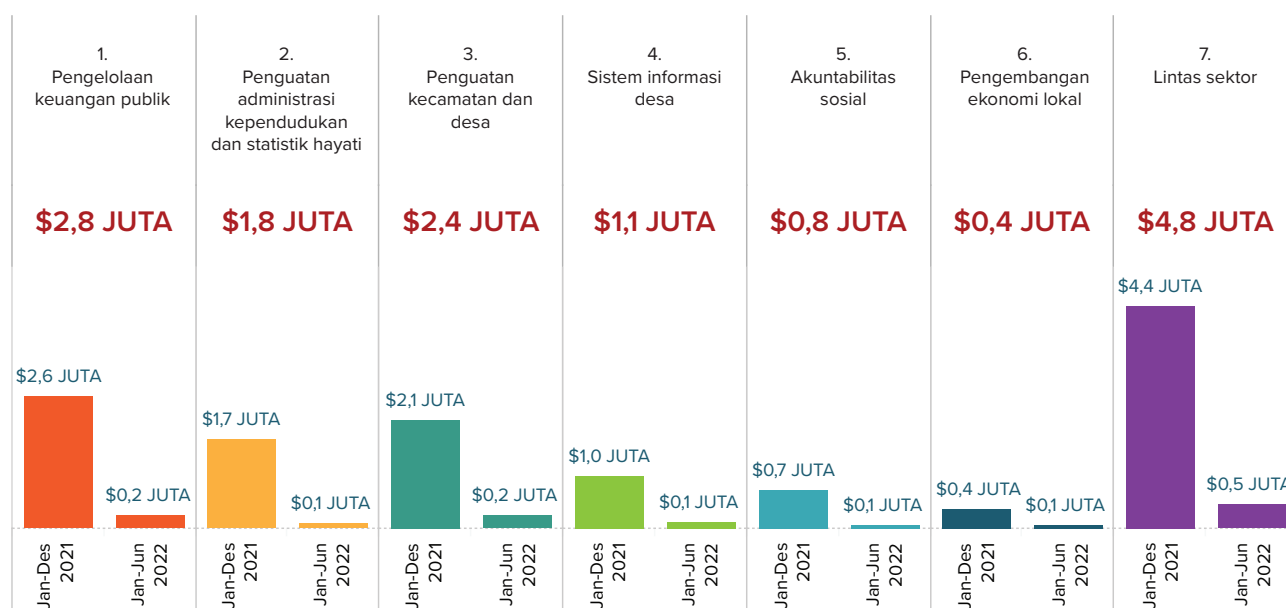
**39,1%**

Persentase alokasi anggaran KOMPAK untuk kegiatan

**211**

Jumlah Kegiatan

#### KEGIATAN UNGGULAN



<sup>15</sup> Semua \$ mengacu kepada dolar Australia

# KONTEKS DAN KINERJA LAMPAU

## KONTEKS OPERASIONAL

KOMPAK memulai 2020 dengan rencana ambisius untuk mereplikasi dan melembagakan model dukungan KOMPAK yang telah terbukti, baik di lokasi-lokasi yang dilayani KOMPAK maupun di luar lokasi-lokasi tersebut. Selama enam tahun terakhir, KOMPAK telah menguji coba berbagai pendekatan untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar dan peluang ekonomi di tingkat daerah, sekaligus memberikan bantuan teknis, masukan kebijakan, dan koordinasi kepada mitra kementerian di tingkat nasional.

Namun, pandemi COVID-19 membuat sasaran dan rencana tersebut terancam gagal. Pandemi ini membawa risiko bagi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan staf, yang merupakan prioritas terpenting. Mulai Maret 2020 hingga akhir 2020, hampir semua staf KOMPAK bekerja dari rumah dengan keterbatasan yang signifikan dalam menghadiri acara secara langsung dan perjalanan fisik. Walau demikian, KOMPAK tetap mampu memberikan bantuan teknis kepada pemerintah dari jarak jauh. Platform virtual membuka peluang untuk berbagi ilmu lebih banyak, karena partisipasi tidak lagi dibatasi oleh biaya, ruang, atau perjalanan. Ini sepertinya akan terus berlanjut hingga 2021.

KOMPAK beradaptasi dengan cepat dan merombak rencana untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas Pemerintah Indonesia yang terus berubah, sekaligus mempertahankan kekuatan inti dan kegiatan unggulannya. Banyak praktik terbaik KOMPAK yang kini semakin relevan dan bermanfaat bagi upaya penanggulangan dan pemulihan pandemi oleh pemerintah. Misalnya, hasil kerja KOMPAK pada sistem informasi di desa menawarkan solusi praktis bagi pemerintah untuk mengidentifikasi pihak yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat program bantuan sosial yang diperluas. Contoh sukses serupa juga ditemukan dalam layanan penjangkauan pencatatan sipil, instrumen PFM, keperantaraan pasar, dan analisis kelompok rentan. Tim Penasihat Strategis Independen (*Independent Strategic Advisory Team/ISAT*) menyimpulkan bahwa “Tidak terbukti bahwa KOMPAK menjadi kurang efektif akibat pandemi. Sebaliknya, pekerjaan KOMPAK justru semakin relevan. Banyak upaya penanggulangan COVID yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan, untuk pertama kalinya, desa. Kapasitas KOMPAK untuk bekerja di tingkat daerah maupun nasional, serta berkomunikasi efektif dengan lembaga daerah mengenai kebutuhan untuk upaya penanganan COVID, berperan sangat penting.”

Pada akhir 2020, ketidakpastian lingkungan operasional sepertinya akan terus berlanjut. Upaya penanganan dan pemulihan COVID-19 akan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. KOMPAK berada di posisi yang tepat untuk mendukung upaya tersebut, dengan menggunakan strategi yang dikembangkan pada 2020, seperti pemberian bantuan teknis dari jarak jauh sambil terus menerapkan model yang telah terbukti berikut hasilnya pada kebijakan, sistem, dan sumber daya pemerintah.

## SITUASI POLITIK DAN EKONOMI

Indonesia memasuki 2020 dengan keyakinan untuk meneruskan tren pertumbuhan selama dasawarsa terakhir untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Pada 2019, ekonomi tumbuh sebesar 5,0%, sementara

tingkat kemiskinan mencatat rekor terendah pada 9,2%. Pemerintah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2020–2024)<sup>16</sup> pada Januari, dengan titik berat pada percepatan pengembangan manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi. Dalam kunjungannya ke Australia pada Februari 2020, Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya kerja sama antara kedua negara tersebut sebagai mitra pembangunan dalam mengatasi dampak perubahan iklim, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Pasifik.

Namun, kondisi berubah seiring mewabahnya COVID di dunia. Indonesia mengonfirmasikan kasus COVID-19 pertamanya di awal Maret<sup>17</sup> dan pemerintah menerapkan langkah yang lebih ketat untuk mengendalikan penyebaran dengan melakukan pengawasan perbatasan dan pembatasan sosial. Pemerintah menyatakan situasi darurat kesehatan publik dan memberlakukan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah ini disertai dengan stimulus pajak pada akhir Maret.

Pengesahan peraturan ‘Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan’<sup>18</sup> berujung pada tambahan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk Tahun Fiskal 2020/2021 dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 dan menopang perekonomian. Langkah ini meningkatkan Anggaran Negara hingga Rp2.613,8 triliun untuk Tahun Fiskal 2020/2021, yang 26,6%-nya merupakan dana tambahan untuk COVID-19. Pos-pos terbesar pengeluaran dialokasikan untuk penskalaan program perlindungan sosial (Rp234,3 triliun), stimulus ekonomi (Rp114,8 triliun untuk UMKM, Rp62,2 triliun untuk BUMN, dan Rp120,6 triliun untuk insentif bisnis), penguatan sektor kesehatan (Rp97,3 triliun), serta penyediaan sumber daya tambahan untuk kementerian teknis dan pemerintah daerah (Rp66,0 triliun).

Dalam waktu sebulan setelah COVID-19 terdeteksi di Indonesia, diperkirakan sejumlah 1,3 juta orang terdesak ke jurang kemiskinan, sehingga menegasikan angka penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir<sup>19</sup>. Statistik terbaru (Maret 2020) menunjukkan bahwa 26,4 juta orang (9,8% dari total populasi) hidup di bawah garis kemiskinan. Walau fase awal pandemi berdampak signifikan terhadap kawasan perkotaan, tingkat kemiskinan di perdesaan tetap jauh lebih tinggi (12,8% dibandingkan 7,4%). Statistik September 2020 akan diperbarui pada Januari 2021.

### Bantuan Australia untuk Indonesia dalam upaya penanganan pandemi COVID-19

Pada Oktober 2020, Australia meluncurkan Rencana Pengembangan Penanganan COVID-19. Rencana ini menguraikan bantuan Australia untuk memaksimalkan efektivitas upaya Indonesia dalam menangani COVID-19 melalui saran teknis dan kebijakan mengenai tanggap darurat kesehatan, perluasan program jaring pengaman sosial, serta stimulus ekonomi dan strategi pemulihan. KOMPAK turut berkontribusi terhadap rencana ini melalui kegiatan-kegiatan unggulannya, yang difokuskan pada penguatan sistem tata kelola untuk memitigasi dampak COVID-19, khususnya terkait perlindungan sosial, layanan pemerintah daerah yang inklusif, dan pengelolaan keuangan publik.

Di Papua dan Papua Barat, Pemerintah Indonesia mengonfirmasikan bahwa Dana Otsus akan dilanjutkan serta akan ditambahkan sebesar 0,25%, sehingga total transfer tahunan mencapai 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU). Mekanisme transfer akan diubah sebagai berikut: 1% akan disalurkan langsung kepada pemerintah provinsi sesuai mekanisme saat ini, sementara sisa 1,25% akan disalurkan berdasarkan indikator kinerja yang akan ditentukan kemudian. Perubahan tersebut akan dibahas oleh DPR tahun ini, dengan hasil akhir berupa revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No. 21/2001. Ini akan menjadi proses politik dengan hasil yang belum pasti.

<sup>16</sup> Peraturan Presiden No. 18/2020

<sup>17</sup> Hingga 14 Desember 2020, Indonesia telah melaporkan 617.820 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 18.819 kematian.

<sup>18</sup> Awalnya Perppu No. 1/2020. Lalu, disahkan sebagai UU No. 2 Tahun 2020.

<sup>19</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat tingkat kemiskinan terendahnya pada September 2019 dengan 24,8 juta orang (9,2%) yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2020, angka ini sudah meningkat hingga 26,4 juta orang (9,8%), sama dengan angka yang tercatat pada Maret 2018 (25,9 juta orang, 9,8%)

Indonesia menjalankan pemilihan kepala daerah secara serempak di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (termasuk 14 kabupaten yang dilayani KOMPAK) pada Desember 2020, setelah ditunda dari September. Hal ini kemungkinan besar akan membawa perubahan politik di daerah, termasuk pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi atau kabupaten terkait.

Terlepas dari kontradiksi ekonomi pada 2020, pemerintah mengharapkan kebangkitan ekonomi dengan pertumbuhan PDB kembali ke 5,0% pada 2021<sup>20</sup>. Pertumbuhan ekonomi pada 2020 diproyeksikan berada di kisaran -1,7 hingga -0,6%. Inflasi diproyeksikan tetap rendah, yaitu 3,0%. Dengan kemungkinan lonjakan tingkat kemiskinan di tengah pandemi, pemerintah berharap dapat menurunkan tingkat kemiskinan kembali ke kisaran 9,2–9,7% pada 2021. Pemerintah juga mengharapkan tingkat pengangguran pada 2021 berada pada kisaran 7,7–9,1%.

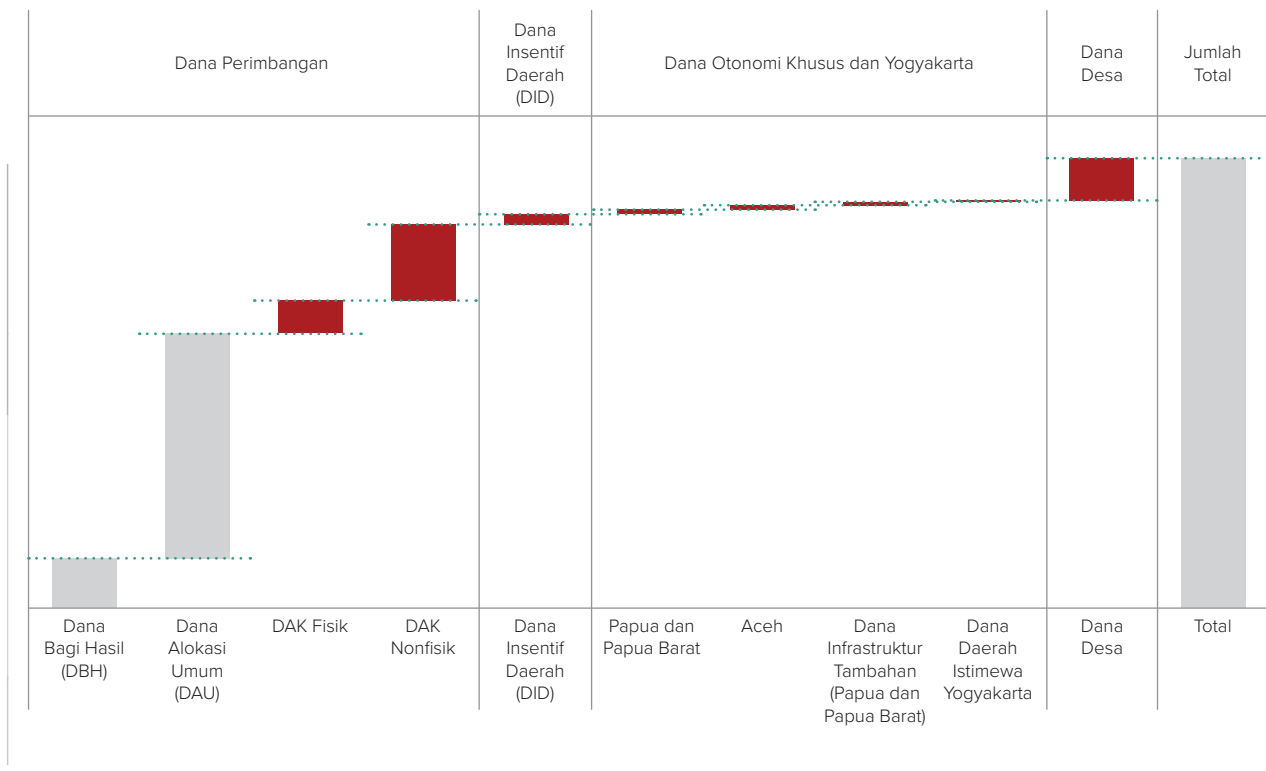
## SITUASI FISKAL

Anggaran Indonesia pada 2021 dipengaruhi pandemi yang sedang berlangsung, dengan fokus pada pemulihan ekonomi. Dari total anggaran sejumlah Rp2,750 triliun (AUD 260 miliar), sebesar Rp795,5 triliun/AUD 75,1 miliar) dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)<sup>21</sup>.

Transfer ke daerah meningkat 4,1% (Rp31,6 triliun) pada 2021 dibandingkan proyeksi 2020. Transfer ke daerah pada 2021, yang mencakup hingga 4,5% dari PDB, bertujuan mendukung peran pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi serta meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan sesuai prioritas nasional.

KOMPAK fokus pada enam mekanisme transfer fiskal daerah senilai Rp288 triliun (38%) pada 2020

Transfer fiskal daerah dan desa pada 2020 (dalam triliun)



<sup>20</sup> Rencana Kerja Pemerintah Indonesia 2021. Peraturan Presiden Nomor 86/2020

<sup>21</sup> Pemerintah Indonesia (2020). UU No. 9/2020 tentang Anggaran Negara 2021



Sumber daya pemerintah desa akan terus mengalami peningkatan, sehingga menguatkan perannya dalam memimpin dan mendanai kegiatan setempat. Pengeluaran pemerintah pusat untuk pemerintah desa telah meningkat dari Rp20 triliun pada 2015 menjadi Rp71 triliun pada 2020, yang mencakup 9,3% dari total transfer ke daerah. Angka ini diperkirakan akan sedikit meningkat pada 2021 hingga mencapai Rp72 triliun.

## REFLEKSI KINERJA KOMPAK

Sepanjang usia KOMPAK, Tim Penasihat Strategis Independen (*Independent Strategic Advisory Team/ISAT*)—yang terdiri dari dua hingga tiga penasihat senior—telah melakukan tinjauan enam bulanan untuk memberikan panduan strategis bagi program KOMPAK. Selama tiap tinjauan, mereka berdiskusi dengan tim KOMPAK di tingkat nasional maupun daerah, DFAT, pemangku kepentingan pemerintah, dan mitra pembangunan lainnya, sekaligus meninjau laporan, strategi, dan evaluasi program yang terkait. Pada November 2020, ISAT menyampaikan laporan terkini yang memuat temuan dan rekomendasi utama. ISAT menyimpulkan bahwa:

“KOMPAK berhasil menangani situasi pandemi yang sulit ini dengan baik, dengan memanfaatkan perombakan rencana yang difokuskan pada COVID untuk menyoroti kelebihan investasi unggulannya. KOMPAK merespons pandemi dengan tepat waktu, terarah, dan efektif. Tantangan untuk 18 bulan selanjutnya adalah memastikan keberhasilan yang diperoleh tahun ini dapat diwujudkan menjadi peningkatan jangka panjang pada tata kelola di tingkat daerah. Untuk mencapainya, diperlukan analisis dan evaluasi tepat waktu atas pekerjaan yang telah dilakukan selama krisis untuk dijadikan bukti kuat sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan berikutnya.”

## REKOMENDASI ISAT (TERKAIT RENCANA KERJA)

REKOMENDASI ISAT	TANGGAPAN DAN AKSI KOMPAK
<p><b>Rekomendasi 1:</b> Fokus rencana kerja tahunan untuk 2021 harus dititikberatkan pada cara KOMPAK bekerja sama dengan mitra untuk mendokumentasikan, merencanakan, dan merangkai proses replikasi, pemanfaatan, dan penskalaan kegiatan unggulannya.</p>	<p>Kegiatan telah dikembangkan dengan tanggal pengakhiran yang jelas serta difokuskan pada pelembagaan dan replikasi, bukan keberlangsungan kegiatan. Ini ditunjukkan melalui pengurangan alokasi anggaran pada 2022 dan peran pemerintah yang lebih besar dalam pendanaan dan pengelolaan model.</p>
<p><b>Rekomendasi 2:</b> Fokus kuat pada capaian harus ditegaskan pada perencanaan kerja tahunan.</p>	<p>Target untuk 2022 dan indikator terukur juga telah disusun, dengan tujuan menghasilkan fokus yang lebih kuat pada capaian. Keduanya akan dilengkapi dengan agenda penelitian KOMPAK, yang akan memaparkan analisis lebih rinci.</p>
<p><b>Rekomendasi 3:</b> Untuk semakin mendorong budaya ke arah capaian, KOMPAK harus berkonsultasi dengan Kedutaan dalam mempertimbangkan rencana praktis yang sesuai siklus perencanaan kerja, sehingga staf di semua tingkat terdorong untuk memikirkan, menganalisis, dan memaparkan bukti yang lebih luas mengenai dampak dan capaian (yang berkontribusi terhadap EOFO) dalam semua aspek komunikasi.</p>	<p>Tinjauan kinerja yang dilakukan tiap enam bulan bertujuan membantu staf untuk memikirkan, menganalisis, dan menunjukkan bukti pelaksanaan rencana kerja mereka. Tinjauan ini telah direstrukturisasi agar porsi waktu untuk membahas dampak strategis dan pembelajaran yang dipetik lebih banyak.</p>

# KEMITRAAN, TATA KELOLA PROGRAM, DAN PENGELOLAAN KINERJA

## KEMITRAAN DAN KOORDINASI

Mitra kementerian KOMPAK adalah Bappenas, Kementerian Urusan Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bappenas adalah badan perencanaan pembangunan Pemerintah yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam mengoordinasikan implementasi KOMPAK, sekaligus lembaga kunci yang membantu menyelaraskan kebijakan dan perundang-undangan antarkementerian serta mendukung pendekatan baru bagi pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan layanan dasar secara lebih efektif.

Dalam lingkup pekerjaannya di tingkat daerah, KOMPAK membantu tujuh pemerintah provinsi dan 24 pemerintah kabupaten. KOMPAK bekerja sama dengan masing-masing pemerintah tersebut dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam rencana kerja ini.

Kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian akan berperan penting dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan KOMPAK, membangun kapasitas mitra pemerintah, dan memungkinkan pemanfaatan keahlian teknis dan regional. KOMPAK memiliki tiga mitra pelaksana kunci yang menyediakan keahlian teknis maupun keahlian regional, serta memungkinkan penyelenggaraan sebagian rencana kerja KOMPAK. Sebelumnya, KOMPAK pernah bekerja sama dengan PEKKA, The Asia Foundation, dan LSM lokal lainnya, dan kemitraan ini akan terus dilanjutkan seiring munculnya kebutuhan.

## DAFTAR MITRA PELAKSANA KUNCI KOMPAK

AGENCY	AREA OF COLLABORATION
<b>PUSKAPA</b>	Kegiatan PASH di tingkat nasional dan daerah.
<b>BaKTI</b>	Implementasi Program LANDASAN di Papua dan Papua Barat.
<b>Seknas Fitra</b>	Desain dan implementasi model akuntabilitas sosial, termasuk Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan mekanisme umpan balik masyarakat (Posko Aspirasi).

## DAFTAR MITRA DFAT DAN AREA KOLABORASI

KOMPAK juga akan memanfaatkan keahlian dan jaringan dari mitra pembangunan lainnya di Indonesia. Ini meliputi Bank Dunia, mitra kunci dalam penskalaan dan penguatan model tata kelola desa KOMPAK, serta fasilitas yang didanai Pemerintah Australia, seperti MAHKOTA, PROSPERA, dan program penerus MAMPU dan PEDULI.

MITRA	AREA KOLABORASI
<p><b>Bank Dunia</b></p> <p>Tata kelola kecamatan dan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain dan implementasi program penguatan dan pembangunan pemerintah desa (P3PD), khususnya pedoman, pelatihan, dan materi Pembina Teknis Pemerintahan Desa/Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PTPD/PbMAD), dan model akuntabilitas sosial.</li> <li>• Advokasi UU Desa dan implementasi akuntabilitas sosial, termasuk publikasi bersama lima ringkasan kebijakan untuk pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia.</li> <li>• Peningkatan Aplikasi Analisis Kemiskinan (SEPAKAT).</li> </ul>
<p><b>Fasilitas yang didanai DFAT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi Komunikasi dan GESI untuk penerima manfaat BANGGA Papua, program bantuan untuk anak di Provinsi Papua, serta penguatan elemen-elemen GESI pada program (MAHKOTA).</li> <li>• Kajian tentang dampak COVID-19 pada penyandang disabilitas (MAHKOTA, PEDULI, AIJP2, Disabled People Organizations Network).</li> <li>• Memberikan masukan untuk pengembangan studi kerentanan PASH (Mampu, Peduli).</li> <li>• Pengelolaan keuangan publik daerah untuk layanan dasar (PROSPERA).</li> <li>• Kerja sama dalam penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kecamatan (Siaga).</li> <li>• Advokasi pada belanja pemerintah daerah untuk pendidikan (INOVASI dan TASS).</li> <li>• Perencanaan dan pembangunan desa yang inklusif, partisipasi ekonomi perempuan, serta pencatatan sipil untuk perempuan dan kelompok rentan (penerus program MAMPU, khususnya melalui PEKKA).</li> </ul>

## TATA KELOLA PROGRAM DAN PENGAWASAN STRATEGIS

KOMPAK memiliki sejumlah mekanisme pengawasan dan pengarahan strategis. Mekanisme ini bertujuan memastikan keselarasan KOMPAK dengan prioritas pemerintah Indonesia dan Australia, serta investasinya pada inisiatif yang paling efektif dan penting.

**Dewan Pengarah KOMPAK:** Dewan Pengarah (*Steering Committee/SC*) adalah forum pengambil keputusan tertinggi bagi KOMPAK, yang memberikan panduan, koordinasi, dan pengawasan strategis. Rapat SC digelar setahun sekali untuk meninjau dan menyetujui dokumen strategis, rencana kerja tahunan, anggaran, dan laporan-laporan utama. SC diketuai bersama oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas serta Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari DFAT.

**Dewan Teknis KOMPAK:** Dewan Teknis (*Technical Committee/TC*) bertanggung jawab kepada SC dan bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan keseluruhan terhadap kegiatan. Rapat TC digelar tiap enam bulan untuk meninjau dan mengesahkan dokumen strategis, rencana kerja tahunan, anggaran, dan laporan-laporan utama. TC diketuai bersama oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas serta Konselor untuk Pembangunan Manusia dari DFAT.

**Kelompok Kerja Capaian:** Bappenas dan KOMPAK menyelenggarakan rapat kelompok kerja untuk tiga capaian akhir KOMPAK. Kelompok ini bertemu tiap enam bulan dan ketua terkait melaporkan perkembangan kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas selaku ketua TC.

**Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group/TWG*) Provinsi dan Kabupaten:** Kantor-kantor KOMPAK di tingkat provinsi mengoordinasikan rapat TWG di tingkat provinsi dan kabupaten, yang diketuai bersama dengan Bappeda dan dihadiri oleh lembaga-lembaga teknis terkait. Rapat ini digelar setahun dua kali, dan perwakilan dari Bappeda (tingkat provinsi) juga menghadiri rapat TC nasional.

**Tim Penasihat Strategis Independen (*Independent Strategic Advisory Team/ISAT*):** ISAT terdiri dari dua hingga tiga konsultan senior yang berpengalaman di bidang tata kelola dan desentralisasi, pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas sosial, dan GESI, yang melakukan kunjungan tiap enam bulan dan memberikan rekomendasi mengenai arahan strategis dan kinerja KOMPAK. ISAT bertanggung jawab kepada Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari DFAT.

**Rapat dwibulanan DFAT:** KOMPAK dan DFAT menggelar rapat dwibulanan yang diketuai bersama oleh Konselor Bidang Pembangunan Manusia DFAT dan Ketua Tim KOMPAK. Rapat rutin ini berfungsi sebagai pemeriksaan untuk mengangkat masalah dan menyajikan info perkembangan. Setahun sekali, rapat ini dilengkapi dengan Tinjauan Kemitraan yang dipandu oleh Perjanjian Kemitraan DFAT-KOMPAK, dan dihadiri oleh Penasihat Menteri untuk Tata Kelola dan Pengembangan Manusia dari DFAT.

## PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KINERJA

Sistem kinerja dipandu oleh Kerangka Kerja Hasil KOMPAK (untuk memberikan gambaran strategis secara umum) dan Kerangka Kerja Logis terkait (untuk daftar indikator). Tiap instrumen dan sistem di bawah ini menyediakan informasi yang memungkinkan KOMPAK untuk mengukur status kegiatan dan keluaran, memetik dan membagikan pembelajaran, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi intervensi, serta menilai dan mendemonstrasikan dampak keseluruhan KOMPAK.

**Target dan Indikator:** Untuk rencana kerja ini, KOMPAK telah memperkenalkan target pengakhiran bantuan yang dicocokkan dengan indikator penilaian kinerja. Target tersebut bersifat aspiratif dan mencerminkan sasaran program dalam mencapai cakupan penuh di lokasi-lokasi yang dilayani KOMPAK. Target ini akan dilengkapi agenda penelitian sebagai dasar bukti capaian dan pembelajaran yang lebih kuat. Target ini bertujuan membuat tujuan KOMPAK lebih jelas dan terukur, serta meningkatkan keterhubungan antara kegiatan, keluaran, dan capaian.

**Tinjauan Kinerja:** Tiap enam bulan, KOMPAK akan memfasilitasi tinjauan kinerja dengan tim kegiatan unggulan dan provinsi. Sesi ini memungkinkan pembagian pembelajaran yang dipetik serta refleksi penting tentang efektivitas pendekatan KOMPAK. Sesi ini diintegrasikan dengan perencanaan kerja agar program dapat lebih disesuaikan terhadap kebutuhan mitra.

**Survei Kabupaten, Kecamatan, dan Desa:** Tiap enam bulan, KOMPAK akan menggelar survei di semua desa, kecamatan, dan kabupaten di lokasi KOMPAK. Survei ini meliputi pertanyaan yang terstandarisasi pada tiap survei untuk memperoleh analisis data longitudinal, serta pertanyaan baru sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan informasi yang terus berubah (seperti pertanyaan khusus terkait COVID-19). Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi indikator, tinjauan kinerja, dan perencanaan program KOMPAK.

**Sistem Informasi Manajemen:** KOMPAK akan memakai sistem informasi manajemen (*Management Information System/MIS*) dalam mengembangkan rencana kerja terperinci serta memantau perkembangan dan risikonya. Sistem ini juga akan dipakai untuk mencatat kegiatan berikut jumlah peserta, mitra, dan hasil kegiatan tersebut. Segala perubahan pada Rencana Kerja Tahunan akan didokumentasikan di MIS.

**Penelitian:** Penelitian akan digunakan untuk mengembangkan lebih jauh bukti efektivitas model dan pendekatan KOMPAK sebagai acuan agenda keberlanjutan. Agenda penelitian terperinci KOMPAK tersedia sesuai permintaan.

**Mekanisme pelaporan dan pengumpulan informasi lainnya:** KOMPAK juga akan mengumpulkan studi kasus serta mengembangkan instrumen dan sistem yang spesifik untuk proyek, seperti untuk keperantaraan pasar, bilamana diperlukan. Pelaporan kegiatan unggulan, provinsi, dan mitra juga akan disampaikan tiap enam bulan.

**Pelaporan DFAT:** KOMPAK akan menyampaikan laporan perkembangan enam bulanan dan tahunan kepada DFAT sesuai Kontrak Pendahuluan. KOMPAK juga akan menyerahkan materi untuk Kerangka Penilaian Kinerja DFAT di Indonesia, serta arahan dan laporan lain sesuai permintaan.

**Pelaporan Pemerintah Indonesia:** KOMPAK akan menyampaikan laporan Berita Acara Serah Terima (BAST) enam bulanan dan tahunan kepada mitra kementerian terhadap perkembangan kegiatan dalam rencana kerja ini. KOMPAK juga akan memberikan arahan dan laporan lain sesuai permintaan.

# 01. PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

## KEGIATAN UNGGULAN

**\$2,8JT**

Anggaran untuk kegiatan unggulan dari Januari 2021 hingga Juni 2022

**23%**

Persentase total anggaran kegiatan KOMPAK

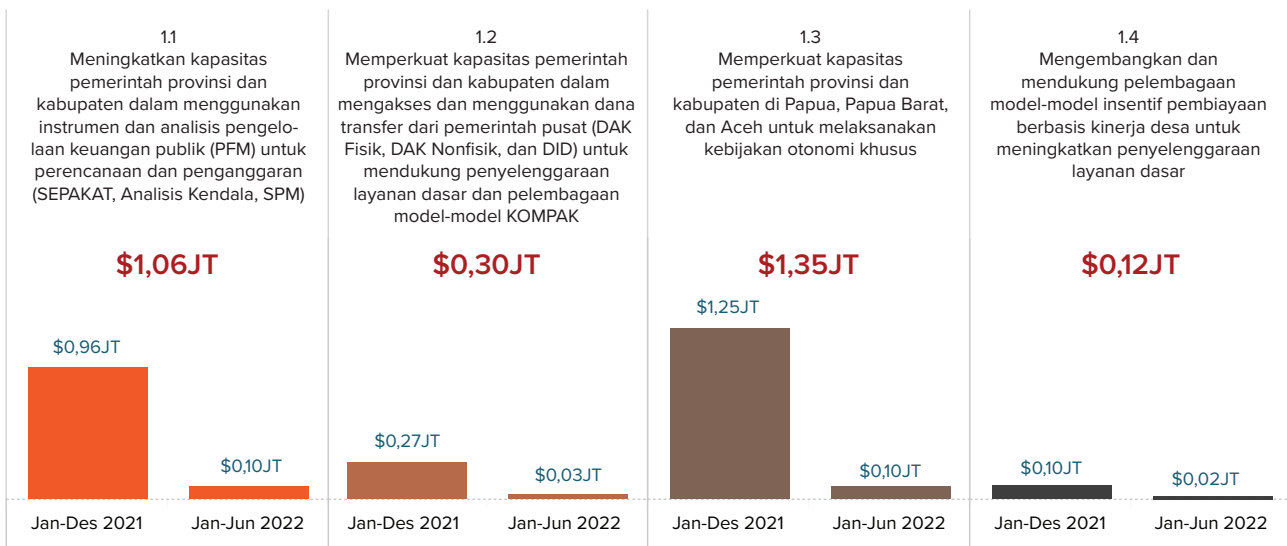
**23%**

Persentase anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan daerah

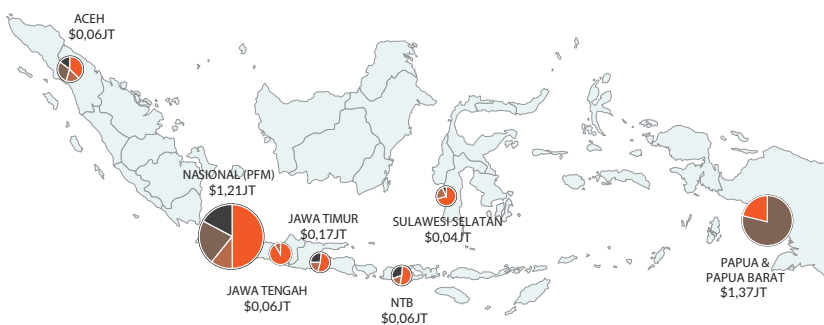
**119**

Jumlah kegiatan unggulan

## KOMPONEN UNGGULAN



## FOKUS GEOGRAFIS



## MITRA KEMENTERIAN



## MITRA LAIN



## ANALISIS SITUASI

Pandemi COVID-19 telah menambah tekanan dan tanggung jawab pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah kabupaten dan desa harus mendanai dan mendistribusikan bantuan langsung tunai baru kepada kelompok miskin dan rentan sekaligus mengawasi inisiatif-inisiatif kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Mekanisme transfer fiskal yang telah ada dari pemerintah pusat juga perlu disesuaikan dengan situasi yang terus berubah untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah serta menambah sumber daya bagi upaya-upaya penanggulangan. Pemerintah juga lebih menitikberatkan pada anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas yang lebih besar untuk penyaluran dana ke daerah-daerah.

Selama lebih dari lima tahun, KOMPAK telah bergerak membantu pemerintah pusat memperbaiki kebijakan transfer fiskal serta membantu pemerintah kabupaten dan desa memperbaiki pengeluaran. Melalui berbagai kegiatan di tingkat nasional dan daerah, KOMPAK berada di posisi unik untuk turut membentuk kebijakan nasional sekaligus membantu pemerintah daerah menerapkan kebijakan tersebut.

Di tingkat nasional, KOMPAK mendukung Kementerian Keuangan dalam memperbaiki kebijakan dan alokasi pendanaan bagi pemerintah daerah, yang ditujukan baik untuk upaya penanggulangan COVID-19 maupun peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, serta administrasi kependudukan dan statistik hayati, melalui penggunaan transfer fiskal yang efektif (yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus), yang dianggap merupakan instrumen paling relevan dan strategis untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar.

Di tingkat daerah, KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggunakan instrumen PFM dalam memperbaiki pengeluaran serta kinerja daerah menyelenggarakan layanan dasar. Instrumen ini mencakup Sistem Perencanaan Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT), analisis pengeluaran di tingkat kabupaten, dan standar pelayanan minimal (SPM). KOMPAK juga membantu Kementerian meluncurkan insentif berbasis kinerja baru bagi desa berdasarkan hasil uji coba di beberapa lokasi terpilih.

## KEMITRAAN

Mitra kementerian utama KOMPAK dalam bidang PFM adalah Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di samping itu, KOMPAK juga bekerja sama erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BaKTI akan mendukung implementasi di Papua dan Papua Barat.

KOMPAK akan berkoordinasi dengan Bank Dunia, PROSPERA, INOVASI, dan MAHKOTA untuk menyelaraskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, area yang memerlukan bantuan teknis, dan untuk berbagi hasil pembelajaran dan temuan penelitian.

## KOMPONEN UNGGULAN

### 1.1 Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menggunakan instrumen dan analisis pengelolaan keuangan publik (PFM) untuk perencanaan dan penganggaran (SEPAKAT, Analisis Kendala, SPM)

#### Tantangan dan peluang

- Pengelolaan keuangan publik (PFM) di tingkat daerah masih menjadi tantangan utama bagi Pemerintah Indonesia. Sekitar 50% belanja negara dilakukan oleh provinsi, kabupaten, atau desa, dengan sekitar 15% pengeluaran berada di tingkat desa. Kualitas dan akses ke layanan dasar bagi kebanyakan masyarakat Indonesia kini bergantung pada seberapa baiknya pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang semakin bertambah tersebut untuk mengelola sekolah, klinik kesehatan, dan administrasi daerah. Agar dapat memanfaatkan dana ini, pemerintah memerlukan instrumen—seperti SEPAKAT, standar layanan minimal, dan analisis kendala anggaran—serta kapasitas untuk menggunakan instrumen tersebut agar dapat mengalokasikan dana, mengelola layanan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya secara efektif. Situasi ini semakin rumit dengan adanya tanggung jawab yang tumpang tindih antara Bappenas, Kemendesa PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu.
- Walaupun KOMPAK telah berupaya memperkuat SEPAKAT dan kebermanfaatannya dalam rencana penanganan COVID-19, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyediaan data bagi pemerintah kabupaten. Masih ada kesenjangan dalam jumlah masyarakat miskin dan rentan, inklusi dan klasifikasi penyandang disabilitas (serta penyesuaian dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan dampaknya terhadap tingkat pengangguran dan peluang bisnis, khususnya apabila informasi ini diperlukan pada waktu yang hampir *real time*.
- Sistem Analisis Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan—yang didukung oleh Kemendagri dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)—dan SEPAKAT—di bawah pengawasan Bappenas—sama-sama bertujuan membantu pemerintah daerah menyusun rencana dan analisis penganggaran yang berpihak pada kaum miskin dan bersumber dari himpunan data yang sama. Memang, kedua sistem ini memiliki pendekatan, tujuan, dasar hukum, dan metodologi yang berbeda, tetapi ada kesamaan yang memerlukan koordinasi dan peluang integrasi. Keterlibatan TNP2K, Bappenas, dan Kemendagri secara terus-menerus dapat membuka peluang kerja sama, dengan mempertimbangkan kapasitas daerah, konteks, dan dukungan institusi Pemerintah Indonesia secara nasional.
- Salah satu ruang lingkup komponen ini adalah meningkatkan keterpaduan alur dan keterhubungan instrumen PFM agar dapat digunakan pemerintah kabupaten untuk saling melengkapi. Misalnya, SEPAKAT membantu mengidentifikasi kelompok miskin dan rentan, kemudian Standar Pelayanan Minimal (SPM) membantu menetapkan biaya dan skala intervensi, dan dana pemerintah pusat (melalui DAK atau dana transfer pemerintah lainnya) yang akan mendanai kebijakan pemerintah daerah tersebut. Saat ini, koordinasi antara langkah-langkah tersebut sangat minim.



- KOMPAK telah menyelesaikan laporan analisis kendala anggaran untuk 15 kabupaten dan telah menyusun laporan ringkasan pembelajaran yang diperoleh. KOMPAK akan memanfaatkan analisis awal ini untuk membuat peta jalan perbaikan pengelolaan keuangan publik di daerah. KOMPAK juga akan mengembangkan kerangka kerja yang lebih kuat untuk menganalisis pengeluaran kabupaten di masa mendatang serta memanfaatkan pembelajaran yang dipetik dalam langkah-langkah praktis.
- Metodologi yang digunakan dalam analisis kendala anggaran dianggap terlalu tinggi untuk dapat membantu masing-masing pemerintah kabupaten serta tidak menyediakan jalur praktis untuk menangani masalah-masalah (ISAT, 2020). Kurangnya kerangka kerja untuk menetapkan standar dasar menyulitkan penilaian kinerja sistem PFM kabupaten. KOMPAK sedang melakukan upaya lanjutan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih kuat dan memanfaatkan pembelajaran yang diperoleh secara lebih praktis.
- Indonesia telah mulai menerapkan standar pelayanan minimal nasional untuk layanan dasar. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan dan pelaporannya, serta pemberian insentif bagi pemerintah kabupaten untuk mengerahkan sumber daya demi mencapai tujuan, mengingat bahwa SPM tidak terkait dengan transfer fiskal. Dalam hal ini, KOMPAK mendukung pemerintah pusat dan kabupaten—khususnya Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas—dalam menjembatani kesenjangan antara pembelajaran yang diperoleh dari penerapan di daerah dengan kebijakan nasional dan pemberlakuannya secara lebih luas.

## Sasaran

Pada 2022 nanti, semua kabupaten KOMPAK dapat menggunakan alat analisis kemiskinan secara efektif untuk perencanaan dan penganggaran kabupaten

Pada 2022 nanti, semua kabupaten KOMPAK telah meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan penganggaran dan pengeluaran

Pada 2022 nanti, kabupaten KOMPAK telah menambah investasi di bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kesehatan ibu dan anak untuk mempercepat pencapaian standar layanan minimal

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa memanfaatkan data untuk perencanaan dan penganggaran menggunakan SEPAKAT dan sistem informasi desa (SID/DMD)	Daerah	Bappenas	Menguji coba keterhubungan antara SEPAKAT dan SID/DMD dan memanfaatkan data untuk menyusun dokumen perencanaan/penganggaran (bersama Bappenas)
	Nasional	Bappenas	Membantu penyempurnaan data SEPAKAT untuk pemutakhiran data dan peluang keterhubungan dengan sumber data lain, seperti DTKS, SID/DMD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan lain-lain (bersama Bappenas)
Membantu pemerintah daerah mengembangkan/merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup model-model KOMPAK dengan menggunakan instrumen PFM yang relevan (SEPAKAT, pembiayaan SPM, Analisis Kendala Anggaran)	Daerah	1. Kemendagri 2. Kemenkeu	Advokasi dengan pemerintah daerah (tim RPJMD) untuk menyusun/merevisi RPJMD yang berfokus pada:  Pemulihan COVID-19  Model-model KOMPAK
	Nasional	1. Bappenas 2. Kemendagri 3. Kemenkeu	Menyediakan bantuan teknis/pendampingan untuk kabupaten terkait (bersama Ditjen Bangda Kemendagri, tetapi berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas)  Melakukan analisis lanjutan mengenai pengelolaan keuangan publik di tingkat kabupaten (bersama Kemenkeu)
Membantu pemerintah daerah memantau/melacak hasil penyertaan SPM dalam perencanaan/penganggaran, yang berfokus pada pelebagaan model-model KOMPAK	Daerah	1. Bappenas 2. Kemendagri	Membantu Gugus Tugas Layanan Dasar dalam penggunaan alat pemantau dan evaluasi SPM untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pencapaian SPM
	Nasional	1. Bappenas 2. Kemendagri 3. Kemenkeu	Menyusun panduan pelaporan pemantauan/ evaluasi SPM (bersama Ditjen Bangda Kemendagri)

## 1.2 Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengakses dan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan DID) untuk mendukung penyelenggaraan layanan dasar dan pelebagaan model-model KOMPAK

### Tantangan dan peluang

- KOMPAK memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kemampuan mereka mengakses dan menggunakan dana pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik serta Dana Insentif Daerah (DID). Seiring meningkatnya kasus COVID-19, tantangan pemerintah kabupaten dalam hal pendanaan dan pemberian bantuan pun turut bertambah. Pemerintah kabupaten harus mengatur prioritas antarsektor dan lembaga pemerintah, menghadapi berkurangnya anggaran yang direalokasikan untuk COVID-19, serta peningkatan jumlah dan perluasan lingkup kebijakan yang dikeluarkan kementerian sebagai upaya penanggulangan COVID-19.
- Untuk DAK fisik (dana infrastruktur), lembaga-lembaga pemerintah setempat biasanya menyusun suatu 'daftar belanja' gabungan, yang menyebabkan banyaknya jumlah proposal serta anggaran yang tidak realistis. KOMPAK memperkenalkan suatu model partisipatif dalam penyusunan proposal DAK yang melibatkan sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan pada tiap tahap, mulai dari analisis data hingga identifikasi prioritas. Diperlukan dukungan lebih lanjut untuk membantu kabupaten menerapkan pendekatan partisipatif ini dan memprioritaskan kebutuhan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan *Value for Money*.
- DAK nonfisik merupakan peluang terbaik untuk mendanai model KOMPAK yang menargetkan prioritas layanan dasar tertentu. KOMPAK mengadvokasi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pendanaan program-program yang telah terbukti manfaatnya di bidang kesehatan, pendidikan, PASH, dan pengembangan ekonomi lokal, termasuk tetapi tidak terbatas pada model KOMPAK. DAK nonfisik berperan penting dalam menjamin pendanaan dan keberlanjutan model KOMPAK secara jangka panjang.
- Implementasi DID mengalami banyak hambatan, antara lain: terbatasnya sosialisasi indikator DID dan terlalu banyak jumlah indikator DID (yang terus bertambah), sehingga menghubungkan indikator dengan investasi kabupaten secara jelas tidak dimungkinkan. Selain itu, pemerintah kabupaten mengalami kesulitan mengakses laporan kinerja sehingga mengurangi transparansi proses tersebut. Agar DID bisa tersalurkan dengan baik, perlu ada keterkaitan yang jelas antara indikator dan tindakan kabupaten. Bantuan yang diberikan KOMPAK kepada pemerintah kabupaten dalam hal akses dan pemanfaatan DID memberikan wawasan penting sebagai bahan pertimbangan Kementerian Keuangan dalam menentukan pendekatan nasional.

### Sasaran

Semua kabupaten KOMPAK berhasil mendanai kegiatan penanganan dan pemulihan COVID-19	Pada 2022 nanti, semakin banyak kabupaten KOMPAK yang telah memenuhi syarat dan menerima DID (kecuali Papua dan Papua Barat)	Pada 2022 nanti, semua kabupaten KOMPAK telah mendanai model KOMPAK yang relevan untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan (PTPD, SID, LABKD)	Pada 2022 nanti, kabupaten KOMPAK telah meningkatkan penggunaan dana bantuan pemerintah pusat untuk sektor prioritas (kesehatan, pendidikan, PASH, LED)
---	--	--	---

Catatan: PFM 1.2 hanya mencakup kabupaten KOMPAK (16) di luar provinsi Papua dan Papua Barat

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu pemerintah setempat memantau pemanfaatan DAK/DID dengan fokus pada pelebagaan model KOMPAK	Nasional	1. Bappenas 2. Kemenkeu	Mengembangkan alat untuk memantau hasil/ penggunaan DAK/DID untuk model KOMPAK; meninjau indikator DID untuk pendidikan (bersama INOVASI) (bersama Kemenkeu)
	Daerah	1. Bappenas 2. Kemenkeu	Membantu pemerintah setempat menggunakan indikator DID sebagai dasar pengukuran kinerja dan membantu pemerintah setempat merencanakan pendekatan inovatif (model KOMPAK); membantu pemerintah setempat memantau DAK
Membantu pemerintah setempat memantau/ melacak hasil proposal DAK/DID untuk pemulihan COVID-19	Nasional	Kemenkeu	Mengembangkan alat pemantau hasil/ pemanfaatan DAK/DID untuk COVID-19
	Daerah	1. Bappenas 2. Kemenkeu	Melatih pemerintah setempat menggunakan alat pemantau pemanfaatan DAK/DID

## 1.3 Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Aceh untuk melaksanakan kebijakan Otsus

### Tantangan dan peluang

- Berdasarkan Evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan analisis tambahan lainnya, KOMPAK menyusun makalah mengenai opsi pendanaan yang tersedia bagi Dana Otsus, dengan tujuan agar Papua dan Papua Barat lebih mandiri dan makmur. Prioritas utama tahun 2021 adalah menyebarluaskan, melacak, dan melaksanakan laporan tersebut beserta rekomendasi terkait. Masih di tahun 2021, KOMPAK juga berencana menyusun laporan lain yang berfokus pada aspek tata kelola Otsus.
- Meskipun pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan komitmen kuat untuk mengembangkan dan melaksanakan program perlindungan sosial baru yang memanfaatkan dana Otsus, namun kedua provinsi ini masih akan menghadapi tantangan yang cukup besar di masa mendatang. Di Papua, KOMPAK bekerja sama dengan MAHKOTA untuk membantu perancangan dan peluncuran awal program BANGGA Papua pada tahun 2019, tetapi dana program ini dihentikan pada tahun 2020 untuk dialihkan ke upaya penanganan COVID-19 dan belum mendapatkan dana untuk tahun 2021 (per Januari 2021). Sementara itu, pemerintah provinsi Papua Barat telah mencadangkan dana untuk program perlindungan sosial baru di tahun 2021, tetapi masih belum merancang modelnya. KOMPAK membantu pemerintah merancang program baru tersebut, yang akan memanfaatkan sistem informasi desa untuk menyalurkan bantuan dana tunai ke rumah tangga masyarakat adat Papua.
- KOMPAK dan MAHKOTA telah menyelesaikan evaluasi program BANGGA Papua di tahun 2020, yang mencakup dua laporan: evaluasi keseluruhan efektivitas program dan analisis spesifik mengenai gender dan elemen inklusi sosial. Kedua laporan memberikan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada 2021.

### Sasaran

Berhasil memperkuat penerapan program perlindungan sosial spesifik setempat di Papua dan Papua Barat

Berhasil memperkuat pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana Otsus di Papua, Papua Barat, dan Aceh

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu pemerintah daerah memperkuat tata kelola program perlindungan sosial (antara lain BANGGA Papua di Papua dan PROSPPEK di Papua Barat)—berlintasan dengan kegiatan unggulan Penguatan Kecamatan dan Desa serta Sistem Informasi Desa	Nasional dan daerah	Bappenas	Advokasi ke pemerintah daerah/Sekretariat Gabungan untuk memperkuat tata kelola program perlindungan sosial (termasuk BANGGA Papua dan PROSPPEK di Papua Barat)
	Daerah	Bappenas	Membantu Sekretariat Bersama untuk memperkuat strategi perlindungan sosial yang memanfaatkan dana Otsus di Papua dan Papua Barat (khususnya mengenai tata kelola—keuangan, komunikasi, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial)
Membantu pemerintah daerah memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan untuk dana Otsus	Nasional	1. Bappenas 2. Kemenkeu 3. Kemendagri	Advokasi ke Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas untuk mendukung penguatan pengelolaan keuangan yang memanfaatkan dana Otsus (berdasarkan pengalaman dan praktik terbaik KOMPAK)
	Daerah	Kemendagri	Advokasi ke pemerintah daerah untuk melanjutkan pendanaan pendekatan/model inovatif seperti program perlindungan sosial yang memanfaatkan dana Otsus (secara khusus BANGGA Papua di Papua dan PROSPPEK di Papua Barat)

## 1.4 Mengembangkan dan mendukung pelebagaan model-model insentif pembiayaan berbasis kinerja desa untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan dasar

### Tantangan dan peluang

- Meninjau kinerja lebih dari 70.000 desa adalah tugas besar. Dalam insentif pembiayaan berbasis kinerja desa yang akan diluncurkan tahun 2021, pemerintah pusat harus menilai kinerja semua desa di Indonesia. KOMPAK akan membantu Kementerian Keuangan melaksanakan tugas besar ini dengan menerapkan pembelajaran yang dipetik dari proyek-proyek uji coba.
- Berdasarkan temuan KOMPAK, pemerintah kabupaten berada di posisi yang tepat untuk meninjau kinerja desa dan mengembangkan indikator kinerja yang sesuai dengan konteks dan prioritas setempat. Dengan demikian, pemerintah kabupaten juga dapat memandu dan membantu desa-desa berkinerja rendah, antara lain melalui kecamatan.
- KOMPAK akan membantu perbaikan rancangan insentif berbasis kinerja desa dengan fokus khusus pada: 1) peran pemerintah kabupaten dalam pengembangan indikator khusus setempat dan pelaksanaan pemeringkatan desa, 2) menyertakan pengukuran kinerja pada kualitas tata kelola desa, 3) memastikan ketersediaan dan kualitas data tingkat desa.

### Sasaran

Pada 2022 nanti, enam pemerintah kabupaten berhasil menguji coba model insentif pembiayaan untuk pemerintah desa dan hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk peluncuran model secara nasional

### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Advokasi ke Kemenkeu untuk memperbaiki formula/indikator insentif berbasis kinerja bagi Dana Desa berdasarkan hasil evaluasi proyek uji coba KOMPAK	Nasional	Kemenkeu	Membantu, mengevaluasi, dan mendokumentasikan penerapan insentif berbasis kinerja desa untuk diskalakan ke tingkat nasional (mis. evaluasi uji coba yang berfokus pada pemanfaatan insentif dan perubahan perilaku desa; penyempurnaan alat evaluasi kinerja serta sosialisasi ke pemerintah daerah)
	Daerah	Kemenkeu	Membantu pemerintah daerah melanjutkan uji coba, antara lain untuk evaluasi kinerja desa dan peraturan untuk pelebagaan

# 02. PENGUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN STATISTIK HAYATI (PASH)

## KEGIATAN UNGGULAN

**\$1,8 JT**

Anggaran untuk kegiatan unggulan dari Januari 2021 hingga Juni 2022

**15%**

Persentase total anggaran kegiatan KOMPAK

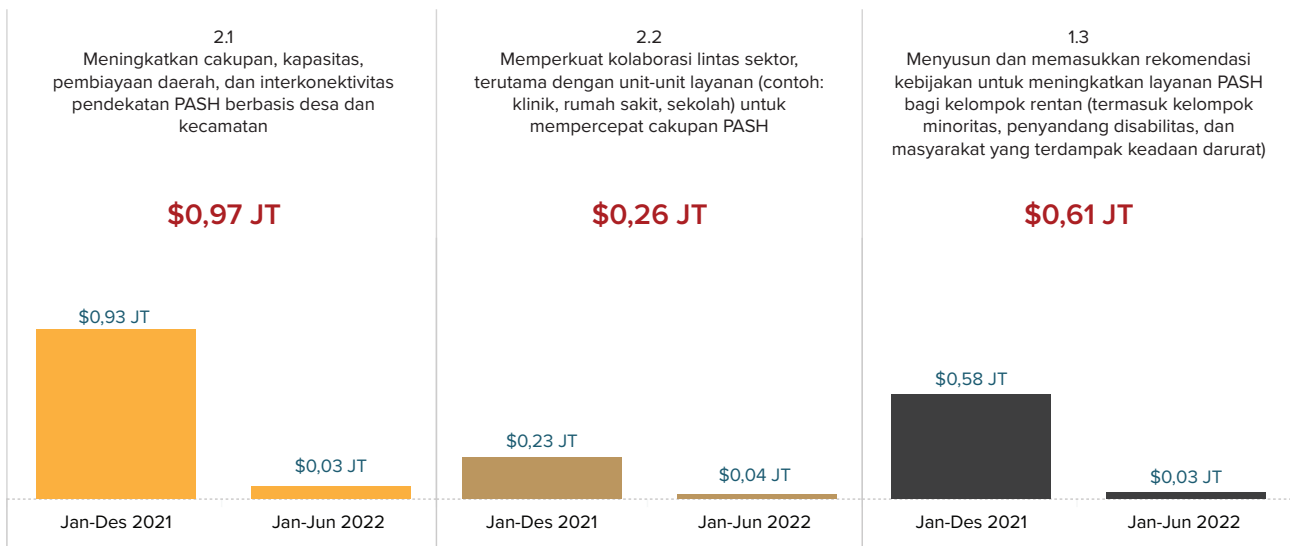
**32%**

Persentase anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan daerah

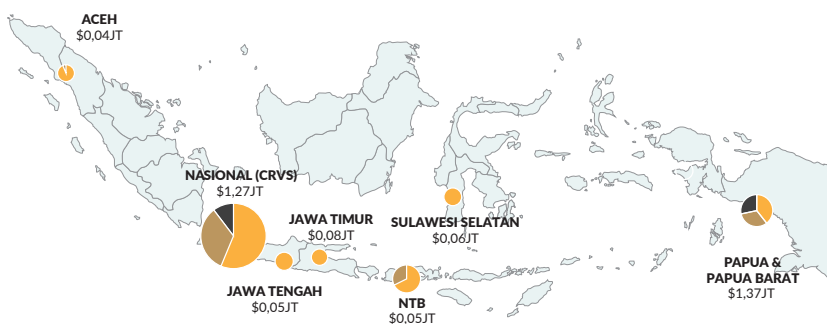
**49**

Jumlah kegiatan unggulan

## KOMPONEN UNGGULAN



## FOKUS GEOGRAFIS



## MITRA KEMENTERIAN



## MITRA LAIN





## ANALISIS SITUASI

Selama lima tahun terakhir, KOMPAK telah membantu pemerintah meningkatkan sistem PASH di semua tingkat, termasuk desa, sehingga dokumen administrasi kependudukan dan data kependudukan dapat diterbitkan secara cepat dan akurat. Meskipun dalam RPJMN lalu target cakupan pembuatan akta kelahiran hanya sebesar 85%, kini pemerintah menargetkan cakupan menyeluruh tercapai pada 2024 nanti.

Data kependudukan yang akurat tidak dapat dipisahkan dari upaya KOMPAK meningkatkan kualitas perencanaan dan pengalokasian sumber daya untuk layanan dasar. Secara khusus, kegiatan unggulan PASH KOMPAK berfokus pada: 1) mengurangi kesenjangan dalam mengakses dokumen administrasi kependudukan, 2) mempermudah proses memperoleh dokumen administrasi kependudukan, 3) mengintegrasikan proses PASH di sektor-sektor terkait, 4) memperjelas mekanisme penganggaran layanan PASH, dan 5) meningkatkan ketersediaan dan interoperabilitas data kependudukan dan statistik hayati.

Di kabupaten KOMPAK, terjadi tren positif dalam cakupan administrasi kependudukan. Penelitian yang dilakukan PUSKAPA untuk menilai perubahan yang terjadi sejak tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa cakupan akta kelahiran meningkat dari 64% menjadi 74%. Kenaikan yang serupa terjadi pada dokumen administrasi kependudukan lainnya. Penelitian itu juga menyimpulkan bahwa model fasilitator PASH desa sangat membantu dalam peningkatan cakupan ini, dengan adanya peningkatan kapasitas desa dalam memberikan layanan administrasi kependudukan dan akses masyarakat ke layanan tersebut.

KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah setempat di 24 kabupaten di tujuh provinsi untuk memperluas layanan PASH melalui fasilitator PASH desa, yang terdiri dari pejabat kantor desa atau sukarelawan dari masyarakat. Para fasilitator ini membantu penduduk desa mengumpulkan dokumen pendukung, memproses permohonan mereka di Kantor Catatan Sipil kabupaten, dan mengantarkan dokumen yang telah jadi kepada mereka. Layanan dari-pintu-ke-pintu ini diberikan secara gratis kepada penduduk desa karena didanai oleh anggaran desa. Model fasilitator PASH desa secara khusus sangat berguna di daerah-daerah dengan sumber daya PASH terbatas, atau daerah terpencil yang sulit terjangkau, atau daerah dengan banyak masyarakat miskin dan rentan.

Dalam upaya menanggulangi pandemi, pemerintah memperluas skema bantuan sosial dan memperkenalkan program bantuan tunai desa yang baru (BLT-Dana Desa) untuk memitigasi dampak pandemi terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah telah mewajibkan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar untuk semua bantuan sosial COVID-19. Namun demikian, DTKS yang ada saat ini masih mengandung kesalahan eksklusi dan inklusi serta tidak mencakup mereka yang menjadi miskin dan rentan akibat COVID-19.

Kerja KOMPAK dalam peningkatan data kependudukan—melalui administrasi kependudukan yang efektif bagi kelompok masyarakat rentan dan peningkatan keterhubungan antara sistem informasi desa dan kabupaten—akan membantu meningkatkan sasaran dan ketepatan waktu bantuan sosial ini. Model fasilitator PASH desa menjadi cara untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan penduduk rentan yang memerlukan bantuan sosial ini. Model ini menjadi instrumen yang penting dalam memperluas dan memperbaiki keakuratan himpunan data penduduk rentan, khususnya DTKS.

## KEMITRAAN

Bappenas adalah kementerian utama KOMPAK untuk PASH. KOMPAK juga bekerja sama erat dengan Kementerian Dalam Negeri.

PUSKAPA, lembaga penelitian kebijakan yang bernaung di bawah Universitas Indonesia, memimpin implementasi administrasi kependudukan. KOMPAK memberikan bantuan berupa pengawasan dan pemantauan bagi PUSKAPA, sementara BaKTI membantu implementasi di Papua dan Papua Barat.

KOMPAK akan berkoordinasi dengan program penerus PEDULI dan MAMPU untuk menyelaraskan rekomendasi kebijakan ke pemerintah, bidang-bidang yang memerlukan bantuan teknis, serta berbagi pembelajaran yang diperoleh.

## KOMPONEN UNGGULAN

### 2.1 Meningkatkan cakupan, kapasitas, pembiayaan daerah, dan interkonektivitas pendekatan PASH berbasis desa dan kecamatan

#### Tantangan dan peluang

- Berdasarkan pengalaman KOMPAK, cakupan akan meningkat saat layanan pendukung administrasi kependudukan berbasis masyarakat (dimana fasilitator PASH desa dapat mengidentifikasi penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan membantu mereka dalam proses pembuatannya) digabungkan dengan waktu pemrosesan yang cepat sejak pengajuan hingga penerbitannya. Berkat berbagai inovasi baru, seperti pemrosesan daring, pemerintah desa dan kabupaten dapat melanjutkan layanan administrasi kependudukan dengan aman selama masa pandemi.
- Berdasarkan penilaian KOMPAK dan PUSKAPA, model berbasis desa (Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa/LABKD) terbukti paling berguna bagi kabupaten dengan sumber daya yang terbatas untuk menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan dan penjangkauan, cakupan administrasi kependudukan yang rendah, memiliki banyak desa terpencil, dan/atau memiliki penduduk miskin dan rentan dalam jumlah besar. Meskipun menunjukkan potensi besar untuk memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan, model LAKBD hanya bisa berfungsi efektif dan berkelanjutan apabila didukung oleh hal-hal berikut ini:
  - Ketersediaan dan prioritas politis untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan administrasi kependudukan;
  - Adanya kerangka kerja regulasi untuk memberikan mandat, membimbing, dan membiayai layanan LAKBD;
  - Alokasi sumber daya yang diperlukan pemerintah desa untuk memberikan layanan dan yang diperlukan pemerintah kabupaten untuk melatih, mendampingi, dan mengawasi pelaksanaannya; dan
  - Keterlibatan dan komitmen Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pelatihan, pendampingan, dan pengawasan layanan desa untuk memastikan bahwa layanan dan penyimpanan data dilakukan menurut prosedur standar dan keamanan yang sesuai.

## Sasaran

Peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan di kabupaten KOMPAK, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan, dari tahun ke tahun	Pada 2022 nanti, semua kabupaten KOMPAK telah mereplikasi model PASH desa di seluruh kabupaten	Pada 2022 nanti, semua kabupaten KOMPAK telah memperluas cakupan, kapasitas, dan pembiayaan daerah untuk layanan PASH di tingkat desa
---	--	---

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Pelebagaan model PASH berbasis desa (LABKD)	Nasional	1. Bappenas 2. Kemendesa PDDT	Memberikan bantuan teknis/panduan kepada pemerintah daerah untuk pelebagaan (termasuk pendokumentasian pembelajaran yang dipetik, menyusun panduan/'how to' yang relevan)
	Daerah	Bappenas	Advokasi ke pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melembagakan model LABKD melalui peraturan/panduan dan anggaran terkait, menyelesaikan implementasi model yang sedang berjalan (lintas dengan Penguatan Kecamatan dan Desa) dengan fokus pada kelompok rentan dan ketepatan waktu dokumen (mis. 0–5 tahun untuk akta kelahiran), replikasi model dalam lingkup provinsi

## 2.2 Memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dengan unit-unit layanan (contoh: klinik, rumah sakit, sekolah) untuk mempercepat cakupan PASH

### Tantangan dan peluang

- Berdasarkan penelitian PUSKAPA, meskipun cakupan akta kelahiran terus meningkat, banyak orang muda, khususnya anak balita, belum memiliki dokumen kependudukan penting. Ini menunjukkan bahwa pencatatan tidak dilakukan pada saat kelahiran. Kurangnya pencatatan di kalangan anak-anak umumnya juga terkait dengan pasangan suami istri yang tidak tercatat, yang kemungkinan besar tidak akan mencatatkan kelahiran anak mereka. Kelompok ini mayoritas lebih miskin dan rentan. Rendahnya pencatatan kelahiran ini berdampak pada keakuratan himpunan data kependudukan dan seringkali menyebabkan adanya populasi 'tersembunyi', khususnya untuk kelompok rentan dan penduduk yang menetap sementara. Ini berarti program pemerintah mungkin didasarkan pada informasi lama yang tidak lengkap.
- Meningkatkan keterhubungan dan koordinasi antara sekolah dan fasilitas kesehatan dengan desa, kecamatan, serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten akan sangat bermanfaat bagi anak-anak dan secara otomatis juga akan bermanfaat bagi anggota keluarga.
- Fokus kegiatan unggulan ini adalah membantu penguatan di sisi pemasok atau penyedia layanan. Meskipun kegiatan ini berhasil meningkatkan cakupan, diperlukan perubahan agar kegiatan dapat lebih fokus pada manfaat layanan administrasi kependudukan dan statistik hayati pada sektor lain (seperti perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan). Pandemi COVID-19 dan implementasi BLT-Dana Desa membuktikan bahwa layanan PASH berbasis desa yang kuat dapat meningkatkan keakuratan dan kelengkapan upaya penanggulangan COVID-19.

## Sasaran

Pada 2022 nanti, semua kecamatan KOMPAK telah mendukung unit layanan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk mempercepat layanan administrasi kependudukan beserta rujukan ke layanan tersebut, khususnya bagi bayi, ibu, dan anak-anak

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Melembagakan dan mendokumentasikan model kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat cakupan administrasi kependudukan	Nasional	Bappenas	Memberikan bantuan teknis/panduan bagi pemerintah daerah untuk pelebagaan, termasuk pendokumentasian pembelajaran yang dipetik dan praktik terbaik
	Daerah	Bappenas	Advokasi ke pemerintah daerah dan desa untuk melembagakan kolaborasi lintas sektor model PASH

## 2.3 Menyusun dan memasukkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan layanan PASH bagi kelompok rentan (termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang terdampak keadaan darurat)

### Tantangan dan peluang

- Cakupan administrasi kependudukan masih terkendala masalah birokrasi dalam penerbitan akta kelahiran dan dokumen lain. Pandemi COVID-19—walaupun menimbulkan tantangan baru bagi sistem kependudukan—juga memberikan peluang untuk memberlakukan perubahan yang lebih cepat. Namun, perubahan ini harus diimbangi dengan risiko jangka panjang yang mungkin timbul (misalnya berkurangnya langkah-langkah pengamanan atau meningkatnya kompleksitas).
- Pada tahun 2020, Bappenas—dengan bantuan PUSKAPA, UNICEF, dan KOMPAK—menerbitkan makalah kebijakan yang menjabarkan kelompok-kelompok utama yang paling rentan terhadap COVID-19, rekomendasi upaya penanggulangan di masa mendatang, dan perkiraan jumlah penduduk rentan yang perlu menerima bantuan sosial menggunakan definisi kerentanan baru. Tantangan pada 2021 adalah membantu pemerintah, sekaligus memberi advokasi bila diperlukan, untuk memberlakukan perubahan yang direkomendasikan.
- Sistem informasi desa dapat menjadi sumber data administrasi kependudukan berbasis masyarakat sekaligus dapat mengidentifikasi kelompok miskin dan rentan yang kemungkinan besar belum memiliki dokumen kependudukan penting. Terdapat peluang memanfaatkan sistem ini dengan lebih baik untuk menentukan sasaran layanan penjangkauan dengan lebih terarah serta mengintegrasikannya dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) nasional untuk meningkatkan kualitas himpunan data ini. Pemanfaatan sistem yang lebih baik akan membantu meningkatkan keakuratan program perlindungan sosial dan program pemerintah lainnya, terutama mengingat bertambahnya jumlah penduduk yang terdampak pandemi. Namun, hal ini belum terlaksana akibat kurangnya kebijakan dan *know-how* yang memungkinkan interoperabilitas antarsistem.

## Sasaran

Bertambahnya jumlah desa KOMPAK yang menggunakan sistem informasi desa untuk memberikan layanan PASH yang terarah kepada kelompok miskin dan rentan dari tahun ke tahun

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Advokasi untuk rekomendasi kebijakan melalui Sekretariat Nasional PASH, Kemendesa PDTT (LABKD) – berlintasan dengan kegiatan unggulan Penguatan Kecamatan dan Desa	Nasional	1. Bappenas 2. Kemendesa PDTT	Analisis kebijakan, advokasi untuk Sekretariat Nasional PASH dan Kemendesa PDTT
Advokasi untuk meningkatkan penggunaan SID dalam mengumpulkan dan memperbarui data kelompok rentan (potensi untuk memperbarui DTKS dan menghubungkannya dengan SIAK) – lintas dengan kegiatan unggulan SID	Nasional	Bappenas	Analisis kebijakan, advokasi dengan Bappenas untuk mendorong penggunaan data bersama Dukcapil
	Daerah	Bappenas	Advokasi/bantuan teknis/pendampingan kepada pemerintah daerah dan desa untuk menggunakan SID dalam mengumpulkan dan memperbarui data kelompok rentan dan untuk mendukung pembaruan DTKS

# 03. PENGUATAN KECAMATAN DAN DESA

## KEGIATAN UNGGULAN

**\$2,4 JT**

Anggaran untuk kegiatan unggulan dari Januari 2021 hingga Juni 2022

**19%**

Persentase total anggaran kegiatan KOMPAK

**78%**

Persentase anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan daerah

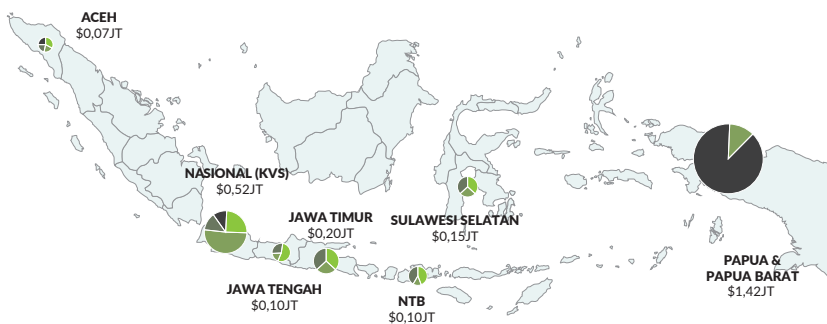
**91**

Jumlah kegiatan unggulan

## KOMPONEN UNGGULAN



## FOKUS GEOGRAFIS



## MITRA KEMENTERIAN



## MITRA LAIN



## ANALISIS SITUASI

Anggaran desa (APB Desa) merupakan salah satu instrumen fiskal terpenting di Indonesia. APB Desa tiap desa meningkat lebih dari empat kali lipat sejak 2014, dari sekitar Rp356 juta (setara dengan AUD35.600) menjadi Rp1.518 juta (setara dengan AUD151.000).

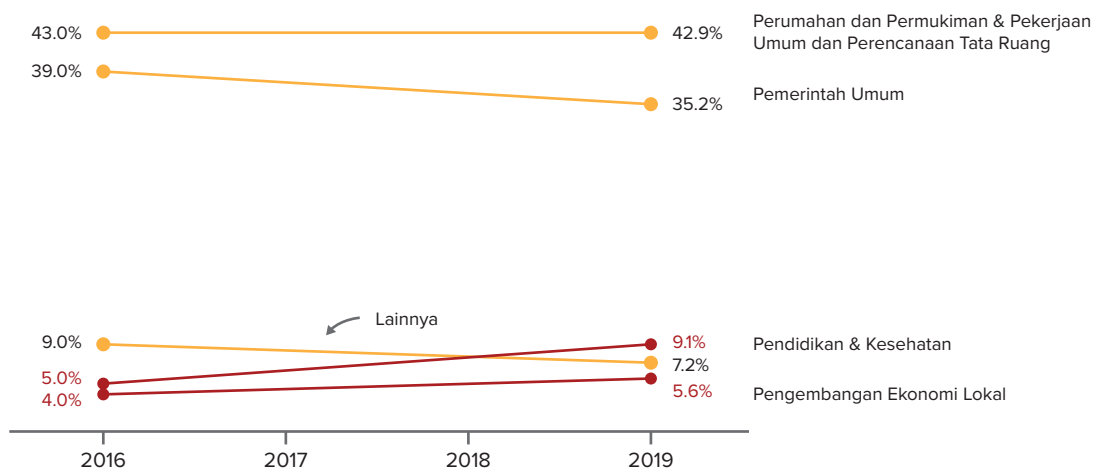
Analisis yang dilakukan KOMPAK dan Bank Dunia menunjukkan perubahan pola belanja desa sejak 2016. Meskipun anggaran belanja untuk pemerintah umum, pekerjaan umum, dan perencanaan tata ruang (termasuk perumahan dan pemukiman) masih mendominasi total anggaran, alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal semakin meningkat. Belanja desa untuk bidang kesehatan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2015, dari 2,5% menjadi 5,5%, sedangkan belanja untuk bidang pendidikan meningkat dari 1,7% menjadi 3,6%.

Pemerintah desa menggunakan anggaran mereka untuk mendanai program kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Akan tetapi, banyak desa yang terbebani dengan bertambahnya anggaran dan tanggung jawab, kapasitas staf yang terbatas, sistem perencanaan dan penganggaran yang kompleks atau kurang memadai, dan banyaknya panduan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan kementerian. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19, saat Kementerian Desa PDTT menerbitkan keputusan yang memungkinkan pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk pemberian bantuan tunai, khususnya BLT-Dana Desa, program padat karya tunai, peningkatan kesehatan, dan upaya pengendalian COVID-19.

KOMPAK berhasil memanfaatkan hasil kerja yang ada pada program penguatan kecamatan dan desa untuk membantu pemerintah desa menanggulangi COVID-19. KOMPAK menyesuaikan model PTPD (kecamatan memberikan bantuan teknis kepada desa) untuk membantu pemerintah desa dalam penganggaran, perencanaan, dan penerapan upaya penanggulangan COVID-19. Tujuan KOMPAK membantu pemerintah desa selama pandemi ini adalah meningkatkan pendanaan yang tersedia untuk upaya penanggulangan dan memastikan bahwa pendanaan tersebut dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk membantu kelompok rentan yang paling terdampak oleh pandemi.

### Proporsi belanja desa dalam bidang **pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi lokal** telah meningkat dari 2016 hingga 2019

Belanja desa berdasarkan bidang fungsional (total = 100%)



Sumber: Analisis Belanja Desa KOMPAK (2019), Analisis Belanja Desa Bank Dunia (2019, untuk data 2016)



Fokus di tahun 2021 adalah membantu program pemulihan COVID-19 dan pelebagaan model PTPD. Dengan peluncuran program kolaborasi Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia P3PD secara nasional, KOMPAK berpeluang menskalakan model Penguatan Kecamatan dan Desa serta pembelajaran yang dipetik dari uji coba program secara nasional.

## KEMITRAAN

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Bappenas adalah kementerian utama KOMPAK dalam bidang Penguatan Kecamatan dan Desa. Kementerian Dalam Negeri mengawasi model PTPD dan PbMAD, Kementerian Desa PDTT berperan dalam perencanaan dan penganggaran inklusif layanan dasar (termasuk model musrenbang inklusif), sementara Bappenas berperan dalam perencanaan umum dan pemantauan.

Bank Dunia memiliki portofolio yang kuat untuk Undang-Undang Desa dan pemerintahan dengan banyak kegiatan penunjang. KOMPAK akan bekerja sama erat dengan Bank Dunia untuk menyelaraskan rekomendasi kebijakan, bidang-bidang yang memerlukan bantuan teknis, dan untuk saling berbagi pembelajaran dan temuan yang diperoleh.

BaKTI akan mendukung implementasi di Papua dan Papua Barat.

## KOMPONEN UNGGULAN

### 3.1 Meningkatkan cakupan dan mendukung pelebagaan model tata kelola kecamatan dan desa (PTPD dan PbMAD<sup>22</sup>)

#### Tantangan dan peluang

- Pesatnya penambahan sumber daya yang tersedia bagi pemerintah desa dan semakin rumitnya lanskap kebijakan menyebabkan banyak pemerintah desa kekurangan sumber daya manusia ahli maupun pemahaman mengenai kebijakan nasional untuk dapat menyusun rencana, anggaran, dan laporan keuangan dengan efektif. Kecamatan, yang sebelumnya tidak memiliki mandat yang jelas, terbukti merupakan tingkat pemerintahan yang efektif untuk memberikan bantuan teknis kepada desa.
- Survei yang dilakukan KOMPAK menunjukkan efektivitas model PTPD dan PbMAD, khususnya dalam membantu pemerintah desa mempersiapkan diri dan menangani pandemi. Namun demikian, penting bagi kecamatan untuk secara efektif menjalankan peran mereka sebagai pengawas dan pendamping pemerintah desa, khususnya di bidang-bidang nonadministratif, seperti pengembangan ekonomi desa atau layanan garis depan sektoral, ketimbang menambahkan jenjang birokrasi tambahan yang tidak perlu.

---

<sup>22</sup> Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Strategi Nasional Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) pada 2017. Strategi ini meliputi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dan model Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD), dengan KOMPAK sebagai mitra utama dalam pengembangan dan implementasinya.

- Dengan diimplementasikannya P3PD (program nasional Bank Dunia untuk mengembangkan kapasitas aparat desa), penting untuk memantau efektivitas pendekatan PTPD dan PbMAD serta memastikan peluncurannya dilakukan secara konsisten. Program ini akan membantu melembagakan fasilitator PTPD dan model PbMAD, serta membantu menstandarkan dan memperkuat sistem informasi dan pelaporan pengelolaan keuangan kecamatan dan desa. Akibat COVID-19, peluncuran program ini tertunda, tetapi diharapkan akan diskalakan secara signifikan pada 2021 dan 2022.

## Sasaran

Pada 2022 nanti, semua kabupaten KOMPAK telah mereplikasi model tata kelola desa di seluruh kabupaten	Pada 2022 nanti, semua kecamatan telah memberikan bantuan teknis kepada pemerintah desa dan bantuan ini mendapat nilai rata-rata umpan balik sebesar 4 atau lebih (dari 5)	Pada 2022 nanti, model tata kelola desa telah dilembagakan dalam panduan dan program nasional
---	--	---

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Mendukung Kemendagri (BAK dan Bina Pemdес) untuk memperkuat peran kecamatan dalam 'binwas' (pembinaan dan pengawasan pemerintah desa) ke desa-desa (regulasi, kapasitas, anggaran, fasilitator/ PTPD, sistem)	Nasional	Kemendagri	Menyusun/merevisi regulasi/pedoman untuk memperjelas peran dan otoritas kecamatan dalam 'binwas desa'; advokasi ke Kemendagri untuk mendukung peran dan otoritas kecamatan dalam 'binwas desa'
	Daerah	Kemendagri	Advokasi/bantuan teknis/pendampingan bagi pemerintah daerah untuk melembagakan model PKAD terpadu (antara lain PTPD, PbMAD, dll) melalui regulasi dan pendanaan yang relevan

## 3.2 Memperkuat peran koordinasi dan pendampingan kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan layanan dasar di desa

### Tantangan dan peluang

- Dengan fokus pada desentralisasi, peran kecamatan dalam mengawasi sekaligus memantau desa dan unit layanan beserta koordinasinya semakin meningkat. Untuk menjalankan mandat yang diperluas ini, kecamatan perlu dibantu untuk mengembangkan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pemahamannya akan kebijakan nasional, serta diberikan panduan yang jelas dan alokasi pendanaan yang cukup untuk menjalankan fungsi ini. Di lokasi KOMPAK, hasil mengenai frekuensi dan jenis penyelenggaraan rapat koordinasi sangat beragam, tetapi secara umum jumlah kecamatan yang mengadakan rapat koordinasi teratur antara desa dan unit layanan tidak sampai setengahnya.
- Pada 2019, KOMPAK dan Bappenas membantu perancangan program DMMD (Distrik Membangun, Membangun Distrik) di kabupaten Jayapura, Papua. DMMD dibuat berdasarkan model PTPD KOMPAK, yang bertujuan untuk memperkuat kecamatan dalam mengawasi penyelenggaraan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta kewirausahaan dan pertumbuhan daerah. Dengan disetujuinya rencana induk pada 2020, fokus KOMPAK untuk 18 bulan mendatang adalah membantu implementasi yang efektif dan kemungkinan replikasi di daerah lainnya di Papua, berdasarkan keputusan presiden terbaru tentang percepatan pembangunan daerah Papua.

### Sasaran

Penguatan kebijakan nasional dan daerah mengenai peran koordinasi dan pendampingan kecamatan

### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu Kemendagri (BAK) mengidentifikasi titik masuk untuk meningkatkan peran/otoritas kecamatan dalam mendukung koordinasi lintas sektor demi penyelenggaraan layanan dan pengembangan ekonomi lokal ke desa-desa	Nasional	Kemendagri	Menilai dan mengidentifikasi elemen kunci yang sukses dari beberapa proyek uji coba (mis. PAUD Holistik Terpadu di NTB, DMMD di Papua, Anak Putus Sekolah di Jawa Tengah, Layanan Kesehatan Berbasis Pulau di Sulawesi Selatan, dll.); mendokumentasikan praktik terbaik untuk mendukung pelebagaan; mengadvokasi Kemendagri untuk mereplikasi dan melembagakan
	Daerah	Kemendagri	Advokasi/bantuan teknis/pendampingan kepada pemerintah daerah untuk melembagakan model melalui regulasi/panduan dan pendanaan yang relevan
		Bappenas	Bantuan teknis kepada Pemerintah kabupaten Jayapura untuk memperkuat model DMMD

### 3.3 Memperkuat kapasitas desa dalam perencanaan dan penganggaran yang inklusif untuk penyelenggaraan layanan dasar

#### Tantangan dan peluang

- Perencanaan dan penganggaran partisipatif yang secara luas diakomodir oleh proses Musrenbang adalah platform yang bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun demikian, terkadang proses ini menjadi terlalu formal dan didominasi oleh kaum pria dan para 'elit' serta tidak memberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi masyarakat lainnya. Akibatnya, hasil yang didapat seringkali kurang dapat menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.
- Pendekatan Musrenbang Inklusif (Musyawarah Khusus) yang digagas KOMPAK adalah kegiatan musyawarah khusus dan terpisah yang dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Musrenbang biasa. Dalam Musrenbang Inklusif, perempuan dan kelompok rentan, khususnya kelompok miskin, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dapat menyuarakan aspirasi mereka dan menyusun proposal untuk diserahkan kepada pemerintah.
- Evaluasi yang dilakukan KOMPAK pada 2020 menunjukkan bahwa meskipun model ini terbukti berhasil meningkatkan partisipasi kelompok sasaran, perombakan lebih lanjut masih dibutuhkan, antara lain upaya untuk mengidentifikasi dan menjangkau kelompok rentan yang lebih luas, keterlibatan yang lebih besar dari organisasi berbasis masyarakat (khususnya organisasi penyandang disabilitas dan sejenisnya), serta peningkatan pelacakan dan pelaporan kembali proposal yang dihasilkan proses ini untuk memastikan tanggung jawab pemerintah desa sekaligus agar peserta dapat melihat bahwa masukan mereka telah dipertimbangkan dan ditindaklanjuti bila perlu.

#### Sasaran

Peningkatan pada partisipasi serta suara perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran desa dari tahun ke tahun

Pada 2022 nanti, semua desa KOMPAK telah menyerahkan APB Desa yang memprioritaskan penyelenggaraan layanan dasar secara tepat waktu

#### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu pemerintah daerah dan desa dalam penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran inklusif (bersama SA, termasuk menggunakan Musyawarah Khusus) melalui PTPD	Nasional	1. Kemendagri 2. Kemendes PDTT	Membantu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT mengembangkan alat/panduan untuk BPD/PTPD; mendokumentasikan praktik terbaik untuk pelembagaan
	Daerah	1. Kemendagri 2. Kemendes PDTT	Advokasi/bantuan teknis/pendampingan kepada pemerintah daerah dan desa
Membantu pemerintah desa/BPD melacak hasil perencanaan dan penganggaran desa (untuk kelompok rentan dan COVID-19)	Nasional	Kemendagri	Memberikan bantuan teknis/panduan; mengembangkan alat/panduan bagi BPD/pemerintah desa untuk melacak hasil perencanaan/penganggaran
	Daerah	Kemendagri	Pelatihan/pendampingan kepada BPD/pemerintah desa

### 3.4 Mendukung perencanaan bersama dan kolaborasi antara kabupaten, kecamatan, desa, dan unit layanan (contoh: klinik, sekolah) dalam penyelenggaraan layanan dasar (LANDASAN)

#### Tantangan dan peluang

- Di Papua Barat, KOMPAK membantu perancangan program PROSPPEK (Program Strategis Pembangunan Peningkatan Kampung), yaitu program dua tahunan senilai \$43 juta dari Dana Otsus. Elemen penting dari PROSPPEK adalah perluasan sistem informasi desa dan kecamatan (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung, SAIK+) ke lebih dari 1.700 desa dengan modul yang dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi tentang masyarakat adat, sehingga penyaluran program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. PROSPPEK juga mencakup komponen untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pemantauan layanan dasar, dan pengawasan desa. Bantuan KOMPAK di tahun 2021 dan 2022 harus menyeimbangkan peluncuran PROSPPEK dan SAIK+ dengan kebutuhan upaya penanggulangan COVID-19 serta prioritas pemerintah provinsi untuk mengembangkan program perlindungan sosial dari Dana Otsus.
- Papua juga akan menghadapi tantangan dalam upaya penanganan COVID-19 serta penguatan koordinasi dan perencanaan daerahnya, yang meliputi implementasi program DMMD (Distrik Membangun, Membangun Distrik) di Kabupaten Jayapura. DMMD dirancang berdasarkan model penguatan kecamatan dan desa KOMPAK, serta didanai oleh pemerintah kabupaten dan lembaga sektoral. Model ini dapat dijadikan contoh bagi kabupaten lain di Papua.

#### Sasaran

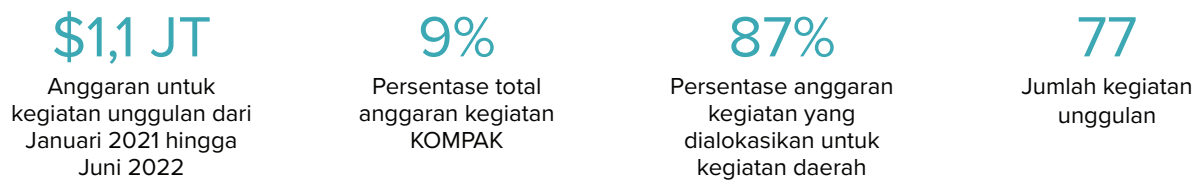
Pada 2022 nanti, semua kecamatan di Papua dan Papua Barat telah berkoordinasi dan bersama-sama merencanakan penyelenggaraan layanan dengan unit layanan, khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan gizi

#### Rencana kerja

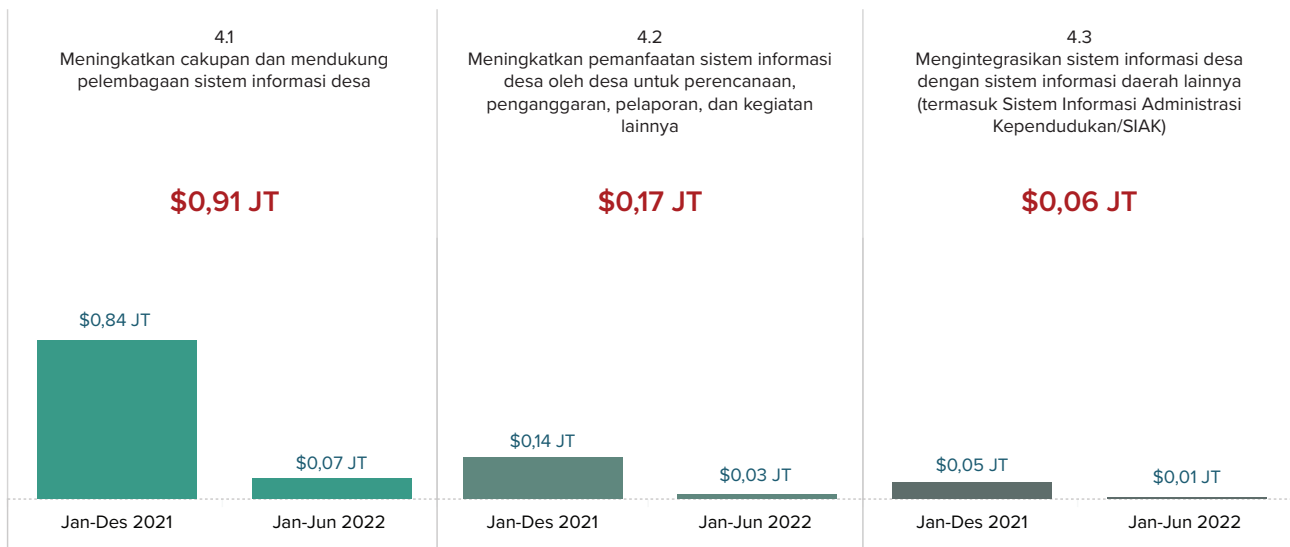
KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu implementasi PROSPPEK di Papua Barat dengan fokus pada penggunaan SAIK+ untuk perencanaan dan penganggaran serta pengembangan program perlindungan sosial baru – lintas dengan Pengelolaan Keuangan Publik dan SID	Nasional	1. Bappenas 2. Kemendesa PDTT	Advokasi dan koordinasi/kolaborasi dengan Kemendesa PDTT untuk mendukung implementasi PROSPPEK
	Daerah	1. Bappenas 2. Kemendesa PDTT	Pelatihan/pendampingan kepada pemerintah daerah dan pemerintah/operator desa
Membantu pemerintah kabupaten di Papua mengimplementasikan model KOMPAK dengan fokus pada penguatan perencanaan sinergi, penggunaan data, dan pemberdayaan kader	Daerah	1. Bappenas 2. Kemendesa PDTT	Advokasi ke pemerintah kabupaten untuk melembagakan model perencanaan bersama

# 04. SISTEM INFORMASI DESA

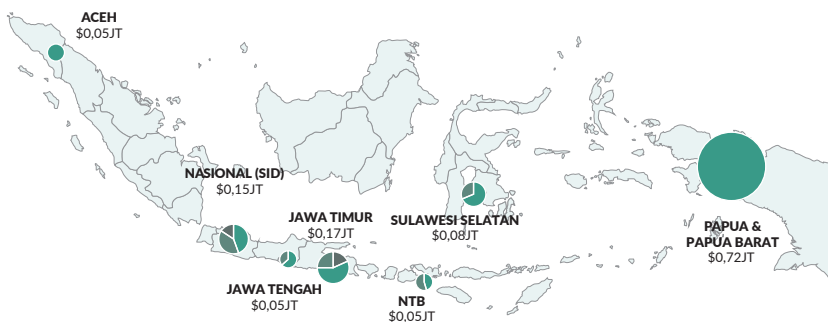
## KEGIATAN UNGGULAN



## KOMPONEN UNGGULAN



## FOKUS GEOGRAFIS



## MITRA KEMENTERIAN



## MITRA LAIN



## ANALISIS SITUASI

Berdasarkan Undang-Undang Desa, semua desa diarahkan untuk memiliki Sistem Informasi Desa (SID). Meskipun tidak ada regulasi atau panduan yang jelas mengenai isinya, SID di wilayah KOMPAK memberikan wawasan mengenai penduduk dan area dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, serta dapat mengidentifikasi penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan maupun anak-anak putus sekolah. Sebagian besar desa KOMPAK (90% per Desember 2020) telah memiliki sistem informasi desa elektronik, sementara sisanya masih menggunakan sistem informasi berbasis kertas.

Sistem informasi desa terbukti menjadi alat yang penting dalam upaya penanggulangan COVID-19. Melalui SID, pemerintah desa dapat mengidentifikasi dengan cepat dan akurat para calon penerima manfaat bantuan tunai (melalui BLT-Dana Desa), termasuk mereka yang telah terdaftar dalam bantuan sosial, mereka yang berada dalam kemiskinan, atau mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan, rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok lansia. Pemerintah desa, dan pada akhirnya pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, memerlukan data yang akurat agar dapat memberikan bantuan sosial serta program pemulihan kesehatan dan ekonomi dengan lebih efektif. Tujuan bantuan KOMPAK adalah agar desa memiliki himpunan data kelompok rentan termutakhir agar semakin banyak yang dapat menerima bantuan sosial untuk memitigasi dampak COVID-19. Pada akhirnya, pemerintah setempat juga akan memiliki data yang lebih akurat untuk merencanakan upaya penanganan.

Sistem utama pemerintah untuk penyimpanan data program perlindungan sosial adalah DTKS, yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan Kajian Belanja Publik Indonesia 2020, “Pada dasawarsa lalu, [Pemerintah Indonesia] telah melakukan upaya penting mengembangkan platform yang menyasar penduduk miskin dan rentan. Pengembangan Basis Data Terpadu (BDT) pada tahun 2011, yang kini dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), merupakan inisiatif besar pertama untuk mengembangkan basis data tunggal bagi 24 juta rumah tangga miskin dan rentan, yang dapat digunakan oleh berbagai program.”<sup>23</sup> Antarmuka pengguna DTKS dikenal sebagai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG). DTKS bertujuan mencatat semua individu dengan pendapatan 40% terbawah dan/atau individu penerima bantuan sosial. Pemerintah daerah dapat menggunakan dan memverifikasi himpunan data DTKS, tetapi perubahan data hanya dapat dilakukan oleh kementerian atau melalui aplikasi daring Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis Android (SIKS-Droid).

Sistem informasi desa bertujuan menyediakan data yang lebih akurat, yang telah diverifikasi, divalidasi, dan dimutakhirkan di tingkat desa. SID juga menyimpan informasi penerima BLT-Dana Desa, tetapi desa dapat memberikan informasi ini untuk dimasukkan ke dalam DTKS agar penerima juga dapat menerima program perlindungan sosial lain (atau di masa mendatang). Belum ada keterhubungan langsung antara sistem informasi desa dan DTKS, meskipun di beberapa wilayah (seperti Bondowoso dan Papua) mulai ada upaya menghubungkan kedua sistem ini untuk mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah setempat. Uji coba ini berhasil memperoleh pembelajaran dan model yang sangat berharga untuk membantu pemerintah menstandarkan dan memperluas penggunaan SID demi kualitas data kemiskinan dan kependudukan yang lebih baik.

Menggunakan sistem informasi desa sebagai sumber data bantuan sosial tidak mudah. Meskipun secara historis tidak ada kementerian yang mengendalikan sistem informasi desa, kini Bappenas mengambil alih kepemimpinan SID melalui inisiatif Digitalisasi Monografi Desa (DMD). Inisiatif ini dapat menjadi peluang strategis bagi pemerintah untuk mengadopsi praktik SID KOMPAK sebagai inisiatif nasional; suatu langkah besar yang menunjukkan pengakuan pemerintah nasional atas peran desa dalam menghasilkan dan memutakhirkan data kemiskinan.

<sup>23</sup> Bank Dunia (2020). Kajian Belanja Publik Indonesia. Hal 198. Dapat dilihat di: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review>



## KEMITRAAN

Bappenas dan Kementerian Desa PDTT merupakan mitra pemerintah utama bagi sistem informasi desa. Kementerian Dalam Negeri juga merupakan pemangku kepentingan utama yang perlu dilibatkan dalam kelompok kerja. Tantangan yang dihadapi KOMPAK adalah kurangnya otoritas yang jelas untuk sistem informasi desa, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel di masa mendatang.

BaKTI akan mendukung implementasi di Papua dan Papua Barat.

KOMPAK akan bekerja sama erat dengan Bank Dunia dan program penerus PEDULI dan MAMPU untuk menyelaraskan rekomendasi kebijakan dengan pemerintah, bidang-bidang yang memerlukan bantuan teknis, serta untuk saling berbagi pembelajaran dan temuan yang diperoleh.

## KOMPONEN UNGGULAN

### 4.1 Meningkatkan cakupan dan mendukung pelebagaan sistem informasi desa

#### Tantangan dan peluang

- Kurangnya model atau panduan standar di tingkat nasional (maupun di tingkat provinsi/kabupaten) mengenai protokol pengumpulan data dan perancangan sistem menjadi peluang bagi KOMPAK untuk membantu koordinasi antarlembaga dan memanfaatkan pembelajaran yang dipetik dari uji coba dan bantuan teknis sebagai bahan pertimbangan pengembangan kebijakan nasional dan daerah serta perancangan sistem di masa depan.
- Tidak adanya sistem informasi desa tunggal dan terstandarkan telah membatasi kapasitas pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program bantuan sosial dan memastikan bahwa penerima manfaat menerima semua manfaat yang berhak diterimanya. Penskalaan yang pesat dari program perlindungan sosial tertentu dalam beberapa tahun terakhir—dan sebagai upaya penanganan COVID-19—membuat tantangan dalam pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi semakin besar.
- Pelebagaan sistem informasi desa di lokasi KOMPAK juga perlu dituntaskan. Hasil survei terakhir (Desember 2020) menunjukkan bahwa 8% desa di lokasi KOMPAK masih mengandalkan pencatatan berbasis kertas dan 22% desa masih memiliki sistem informasi elektronik yang belum daring (yang memungkinkan pemutakhiran data secara otomatis serta pembuatan sistem di kabupaten dan kecamatan). Selain itu, baru separuh kecamatan di kabupaten KOMPAK yang mengimplementasikan sistem informasi desa. Pelebagaan akan memerlukan instalasi sistem (perangkat keras dan lunak), pengumpulan dan pengunggahan data, pendanaan, dan pelatihan operator.
- Perluasan sistem informasi desa secara besar-besaran di Papua (SIO-PAPUA) dan Papua Barat (SAIK+) serta perancangan dan implementasi program perlindungan sosial dari Dana Otsus membuka peluang untuk mengintegrasikan semua sistem dan program ini. Sistem informasi desa memberikan mekanisme untuk meningkatkan keakuratan dan pengelolaan data untuk program perlindungan sosial, khususnya dalam mengidentifikasi dan mendaftarkan kelompok perempuan, miskin, dan rentan.

## Sasaran

Pada 2022 nanti, seluruh kabupaten KOMPAK telah mereplikasi sistem informasi desa dan ada bukti replikasi lebih lanjut telah dilakukan di seluruh Indonesia

Pada 2022 nanti, seluruh desa KOMPAK telah melembagakan sistem informasi desa

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu pemerintah daerah dan desa memanfaatkan SAIK+ dan SIO-PAPUA untuk membantu perencanaan dan penganggaran (bersama kegiatan unggulan Penguatan Kecamatan dan Desa)	Nasional	Bappenas	Advokasi ke Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Desa PDTT untuk memperkuat penggunaan Dana Otsus bagi SAIK+ dan SIO-PAPUA
	Daerah	Bappenas	Pelatihan/pendampingan kepada pemerintah daerah dan pemerintah/operator desa
Mendukung pemerintah daerah dan desa melembagakan SID	Nasional	1. Bappenas 2. Kemendesa PDTT	Memberikan bantuan teknis/panduan; mengembangkan alat/panduan/ <i>how-to</i> ; membagikan praktik terbaik/pembelajaran yang diperoleh
	Daerah	1. Bappenas 2. Kemendesa PDTT	Advokasi ke pemerintah daerah dan desa; pelatihan/pendampingan

## 4.2 Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi desa oleh desa untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan kegiatan lainnya

### Tantangan dan peluang

- Memiliki sistem informasi saja belum cukup. Desa harus memanfaatkan sistem tersebut untuk perencanaan, penganggaran, dan kegiatan lainnya, bukan hanya menggunakannya sebagai alat administrasi semata. Di awal tahun 2020, sekitar tiga perempat desa KOMPAK telah menggunakan sistem informasi secara aktif sesuai tujuan yang dimaksudkan. Dengan adanya pandemi, peran sistem informasi menjadi semakin penting sebagai basis data untuk mengidentifikasi kelompok miskin dan rentan penerima BLT-Dana Desa dan layanan dasar lainnya.
- Perbaikan data DTKS akan terus menjadi prioritas utama dalam fase pemulihan pandemi dan setelahnya. Data kelompok rentan akan menjadi akurat dan tepat waktu apabila dikelola oleh pejabat desa yang mumpuni, dimutakhirkan dalam sistem informasi desanya sendiri, dan dimanfaatkan untuk perencanaan dan penganggaran desanya sendiri. Peluncuran BLT-Dana Desa dan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menysasar penerima manfaat membuat keterhubungan antara sistem informasi desa dan layanan penjangkauan menjadi semakin penting untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan individu rentan, sehingga mereka dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan.

### Sasaran

Peningkatan pemanfaatan data oleh pemerintah desa untuk perencanaan dan pembuatan program, khususnya untuk membantu kelompok miskin dan rentan, dari tahun ke tahun

### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu pemerintah desa menggunakan SID untuk mengumpulkan dan memutakhirkan data kelompok rentan (termasuk keterhubungan dengan DTKS)	Nasional	Bappenas	Menyediakan bantuan teknis/panduan; mengembangkan alat/panduan/how-to
	Daerah	Bappenas	Pelatihan/pendampingan kepada pemerintah daerah dan pemerintah/operator desa
Membantu pemerintah desa menggunakan SID untuk mendukung perencanaan dan penganggaran model KOMPAK (mis. anak putus sekolah di Pekalongan, kesehatan ibu dan anak di Bondowoso/Sibuba, PAUD di Sumbawa, serta menghubungkan data administrasi kependudukan dengan dasbor kabupaten/kecamatan bila perlu)	Nasional	Kemendesa PDTT	Menyediakan bantuan teknis/panduan/metode untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi hasil serta menyediakan hasil pembelajaran kepada Bappenas untuk berbagi data – berlintasan dengan PASH
	Daerah	Bappenas	Advokasi ke pemerintah daerah dan desa; pelatihan/pendampingan

## 4.3 Mengintegrasikan sistem informasi desa dengan sistem informasi daerah lainnya (termasuk SIAK)

### Tantangan dan peluang

- Kekuatan sistem informasi desa akan bertambah apabila data dapat diintegrasikan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Dengan mengintegrasikan data desa ke sistem yang telah ada, kualitas data akan meningkat, yang pada akhirnya akan membantu pemerintah di tingkat yang lebih tinggi merencanakan dan mengalokasikan sumber daya. Di sinilah KOMPAK dapat memanfaatkan hasil kerjanya dengan sistem informasi lain. Sistem prioritas KOMPAK antara lain meliputi SEPAKAT (alat analisis kemiskinan di tingkat kabupaten), SIAK (basis data administrasi kependudukan nasional), dan DTKS (yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima manfaat bantuan sosial).
- Bappenas juga berencana memperluas inisiatif Digitalisasi Monografi Desa (DMD) di tahun 2021, yang bertujuan untuk menskalakan sistem informasi desa di seluruh Indonesia dan memanfaatkannya untuk memutakhirkan DTKS secara nasional di 2021 sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya reformasi sistem perlindungan sosial Indonesia jangka panjang yang memperkuat peran desa dalam pengumpulan dan pengelolaan data. KOMPAK berada di posisi yang tepat untuk membantu membentuk inisiatif ini, dengan memanfaatkan hasil uji coba dan pengalaman menggunakan sistem informasi nasional lain di masa lalu.
- Sistem informasi kabupaten dan kecamatan (yang menggunakan data dari sistem informasi desa) masih berupa prototipe. Masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan dasbor yang ramah pengguna agar pejabat kabupaten dan kecamatan dapat menarik data dan informasi yang mereka perlukan.

### Sasaran

Penguatan integrasi sistem informasi desa dengan sistem informasi daerah lainnya

### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu Bappenas dan pemerintah daerah menguji coba Digitalisasi Monografi Desa (DMD) di Bondowoso – terhubung dengan SEPAKAT desa dalam Pengelolaan Keuangan Publik	Nasional	Bappenas	Menyediakan bantuan teknis/panduan; mengembangkan alat/panduan/how-to; mendokumentasikan/mengevaluasi hasil dan menyediakan hasil pembelajaran.
	Daerah	Bappenas	Mengimplementasikan uji coba (pelatihan, pengembangan, dan pengadopsian sistem)

# 05. AKUNTABILITAS SOSIAL

## KEGIATAN UNGGULAN

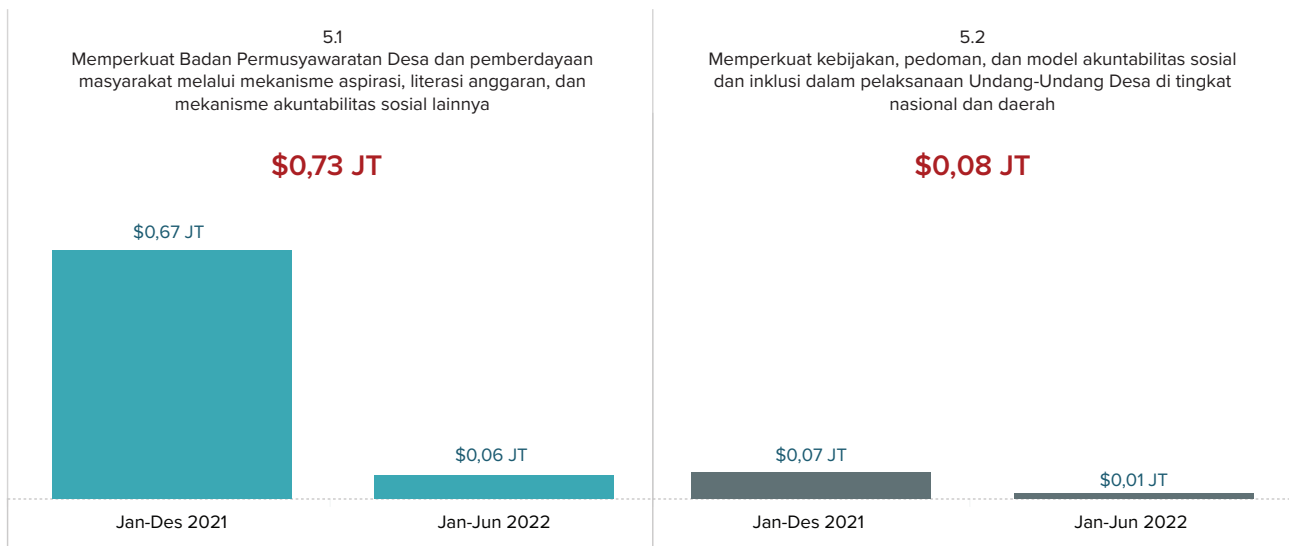
**\$0,8 JT**  
 Anggaran untuk kegiatan unggulan dari Jan 2021 hingga Jun 2022

**7%**  
 Persentase total anggaran kegiatan KOMPAK

**14%**  
 Persentase anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan daerah

**42**  
 Jumlah kegiatan unggulan

## KOMPONEN UNGGULAN



## FOKUS GEOGRAFIS



## MITRA KEMENTERIAN



## MITRA LAIN



## ANALISIS SITUASI

Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya seringkali tidak diikutsertakan dalam perencanaan desa dan mekanisme akuntabilitas. Akan tetapi, jika masyarakat dan kaum minoritas diikutsertakan dalam proses ini, biasanya dana akan digunakan untuk kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>24</sup>.

Pandemi COVID-19 akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dan partisipasi anggota masyarakat dan kelompok rentan. Pembatasan sosial dan perjalanan sudah membatasi pelaksanaan forum perencanaan tahunan desa (Musrenbang) dan kini semakin sulit lagi untuk menyelenggarakan Musyawarah Khusus untuk perempuan dan kelompok rentan yang mungkin terkendala keterbatasan akses lain atau masalah kesehatan.

Bahkan sebelum COVID-19, tingkat partisipasi secara keseluruhan dalam forum perencanaan desa sangatlah rendah, sekitar 16 persen, dan sebagian besar peserta adalah pria dengan pendapatan lebih tinggi<sup>25</sup>. Pemerintah desa harus menggunakan dana desa untuk memberikan bantuan tunai (khususnya BLT-Dana Desa), menyebarkan informasi kesehatan, dan memantau upaya penanganan COVID-19. Untuk memenuhi semua kebutuhan ini secara efektif, KOMPAK mendorong pendekatan yang digerakkan oleh masyarakat: menempatkan penduduk sebagai pusat dukungan kepada pemerintah desa untuk memberikan layanan ini dan membentuk sistem untuk mengawasi pertanggungjawaban pemerintah.

Pandemi ini telah menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan, kesejahteraan sosial, dan mata pencaharian kaum perempuan dan kelompok rentan. Penilaian cepat terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang didukung KOMPAK menemukan bahwa pandemi ini telah mengurangi penghasilan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas ganda, pekerja informal, lansia, dan mereka yang berpendidikan rendah. Kajian lain yang dilakukan oleh LD FEB UI dan UNESCO (2020) menemukan bahwa jumlah perempuan di sektor pekerjaan informal, yang mengalami pukulan ekonomi terbesar dari pandemi ini, sangat besar. Pandemi ini, yang menimbulkan tugas tambahan bagi perempuan untuk merawat dan menjaga anak, juga berdampak terhadap partisipasi mereka dalam ketenagakerjaan.

Selama lima tahun terakhir, KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menguji dan memperluas mekanisme akuntabilitas sosial, antara lain melalui upaya untuk memperkuat keahlian, peran, dan representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta meningkatkan transparansi dan mekanisme umpan balik bagi anggota masyarakat. Strategi ini telah terbukti keberhasilannya di masa sebelum pandemi, dan kini semakin penting lagi demi memastikan upaya penanggulangan yang tangguh dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem akuntabilitas sosial efektif yang dipadukan dengan pemerintah desa, sistem informasi, dan administrasi kependudukan yang kuat, sangatlah penting dalam memastikan pemberian layanan yang diperlukan oleh kelompok rentan.

---

<sup>24</sup> Bank Dunia dan KOMPAK (2019). Catatan Kebijakan Undang-Undang Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa.

<sup>25</sup> Bank Dunia (2018). *Baseline Findings from the Sentinel Villages Study*.

## KEMITRAAN

Kemendesa PDTT bertindak sebagai kementerian yang utama. KOMPAK juga akan bekerja sama dengan Bappenas.

Seknas Fitra akan terus menjadi mitra implementasi yang membantu BPD menjalankan pendekatan Posko Aspirasi dan memberikan pelatihan literasi anggaran dan pendampingan teknis.

KOMPAK akan bekerja sama erat dengan program penerus MAMPU dan Bank Dunia untuk menyelaraskan kegiatan, alat, dan rekomendasi kebijakan akuntabilitas sosial.

## KOMPONEN UNGGULAN

### 5.1 Memperkuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme umpan balik, literasi anggaran, dan mekanisme akuntabilitas sosial lainnya

#### Tantangan dan peluang

- Melalui Seknas Fitra, KOMPAK telah menguji coba berbagai pendekatan untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pembentukan mekanisme penyaluran aspirasi dan membangun kapasitas mereka dalam mengkaji dan mengkritik anggaran desa dan laporan keuangan. Agar uji coba ini berhasil, KOMPAK dan Seknas Fitra harus mendokumentasikan dan membagikan pembelajaran yang diperoleh serta mengidentifikasi bagian-bagian yang dapat direplikasi dan diadopsi sebagai kebijakan nasional atau daerah. Meskipun ada perbaikan yang menjanjikan di 33 lokasi uji coba, masih diperlukan bukti lebih lanjut dari pelebagaan dan penerapan pembelajaran secara lebih luas.
- KOMPAK perlu memperkuat dasar pembuktian untuk menentukan efektivitas Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan Posko Aspirasi. Wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa pelatihan sangatlah berguna dalam meningkatkan pemahaman tentang UU Desa, perencanaan, dan penganggaran, khususnya bagi anggota BPD yang jarang mengikuti pelatihan sebelum Sekar Desa terbentuk. Lebih jauh lagi, Posko Aspirasi terbukti berguna dalam membantu pemerintah desa untuk mengidentifikasi prioritas daerah yang harus disertakan dalam rencana pembangunan dan anggaran tahunan. Akan tetapi, masih tersisa tantangan bagi BPD untuk dapat menganalisis dan mengagregasikan aspirasi yang terkumpul, serta melaporkan kembali kepada masyarakat terkait kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan prioritas yang telah disepakati.

#### Sasaran

Pada 2022, anggota masyarakat di sebagian besar desa dapat mengakses mekanisme Posko Aspirasi formal (di wilayah Seknas Fitra, semua (33) desa berhasil mencapai sasaran ini)

Pada 2022, sebagian besar desa menerbitkan laporan anggaran dan belanja desa kepada publik (di wilayah Seknas Fitra, semua (33) desa berhasil mencapai sasaran ini)

Pada 2022, sebagian besar desa memiliki BPD yang aktif dan efektif



## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Mendukung Kemendesa PDTT dan pemerintah daerah untuk memperkuat peran masyarakat dan BPD dalam mengorganisir/memfasilitasi proses perencanaan/penganggaran pembangunan desa inklusif (keterkaitan yang lebih baik dengan Penguatan Kecamatan dan Desa, GESI, dan Musrena/Muskus)	Nasional	Kemendesa PDTT	Memberikan TA/panduan; mengembangkan alat; mendokumentasikan dan mengevaluasi hasil/pembelajaran yang diperoleh
	Daerah	Kemendesa PDTT	Advokasi/TA/pendampingan kepada pemerintah daerah (termasuk kecamatan/PTPD), pemerintah desa, dan Forum BPD untuk memperkuat peran masyarakat dan BPD dalam Musrenbang/Musdes inklusif melalui regulasi/panduan dan anggaran
Membantu pemerintah desa/BPD melacak hasil Posko Aspirasi dalam perencanaan dan penganggaran desa, termasuk penanganan keluhan dan umpan balik kepada masyarakat	Nasional	Kemendesa PDTT	Memberikan TA/panduan; mengembangkan alat/panduan agar BPD/pemerintah desa dapat melacak hasil perencanaan/penganggaran – tertaut dengan SID, GESI, Inovasi/Digitalisasi
	Daerah	Kemendesa PDTT	Advokasi/TA/pendampingan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD untuk menggunakan alat dalam proses perencanaan berkala

## 5.2 Memperkuat kebijakan, pedoman, dan model akuntabilitas nasional dan inklusi dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa di tingkat nasional dan daerah

### Tantangan dan peluang

- Terdapat peluang penskalaan model KOMPAK untuk akuntabilitas sosial (atau variasinya) di tingkat nasional melalui program P3PD Bank Dunia dan kebijakan nasional dari Kementerian Desa PDTT. Pada tahun 2020, KOMPAK membantu Kementerian Desa PDTT mengembangkan panduan nasional mengenai akuntabilitas sosial. Pada tahun 2021, diperlukan tindak lanjut lebih jauh untuk memastikan implementasinya dan apakah insentif dan mekanismenya berfungsi dengan baik.

### Sasaran

Pada 2022, model KOMPAK untuk akuntabilitas sosial dilembagakan di semua kabupaten KOMPAK sesuai dengan panduan nasional

### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu Kemendesa PDTT menyelesaikan rancangan akuntabilitas sosial dan inklusi dalam penerapan UU Desa	Nasional	Kemendesa PDTT	Finalisasi dokumen hasil pembelajaran; menyediakan bahan untuk advokasi; advokasi ke Kemendes PDTT (tertaut dengan P3PD)
	Daerah	Kemendesa PDTT	Dokumentasi hasil pembelajaran dan praktik terbaik

# 06. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

## KEGIATAN UNGGULAN

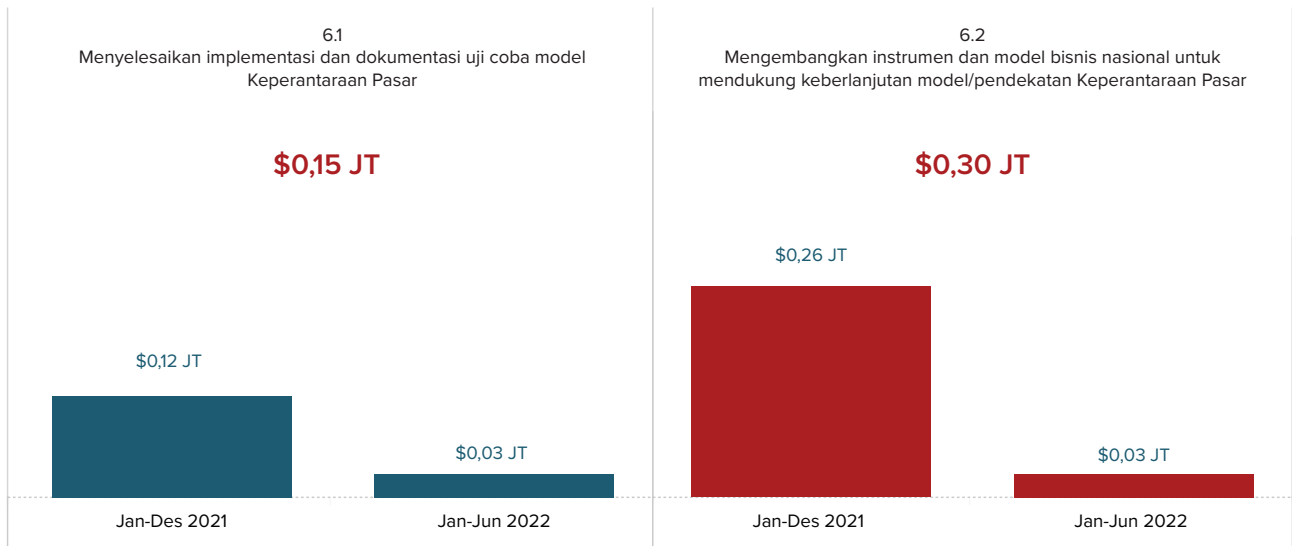
**\$0,4 JT**  
 Anggaran untuk kegiatan unggulan dari Jan 2021 hingga Jun 2022

**4%**  
 Persentase total anggaran kegiatan KOMPAK

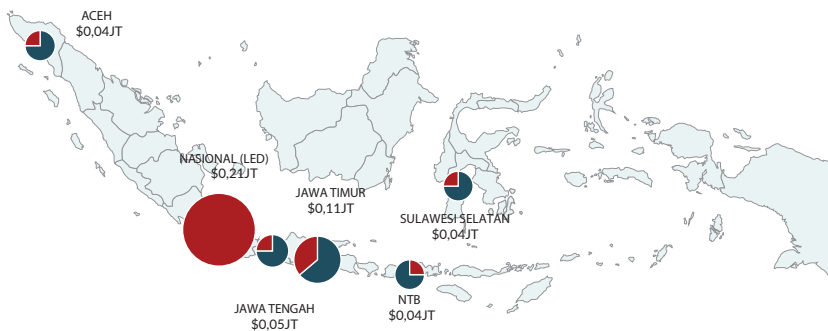
**54%**  
 Persentase anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan daerah

**42**  
 Jumlah kegiatan unggulan

## KOMPONEN UNGGULAN



## FOKUS GEOGRAFIS



## MITRA KEMENTERIAN



## MITRA LAIN



## ANALISIS SITUASI

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami pukulan hebat akibat COVID-19. UMKM mencakup 90 persen dari seluruh perusahaan di Indonesia, dan berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan menjadi mata pencaharian bagi jutaan penduduk. Penurunan ekonomi yang drastis ini telah mendorong jutaan orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan, terutama perempuan dan kelompok rentan. Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp115 triliun dari APBN 2020 untuk usaha kecil sebagai bagian dari paket bantuan COVID-19. Kebijakan tersebut mencakup insentif pajak, restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga pinjaman dan program jaminan, serta bantuan pemulihan bagi usaha mikro.

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pemulihan ekonomi sebagai salah satu tujuan politis utamanya. Hal ini menjadi peluang bagi KOMPAK - bermitra dengan Bappenas - untuk mengoptimalkan model keberantaraan pasar dan menilai pendekatan yang paling efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan keuntungan bagi kelompok usaha kecil di tingkat desa.

Pendekatan ini menawarkan peluang bagi pemerintah desa untuk mempromosikan UMKM. Model yang dikembangkan oleh Bappenas dan diuji coba oleh KOMPAK ini mendukung UMKM daerah - seperti koperasi, BUMDES/BUMDESMA, dan kelompok usaha perempuan - untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan perempuan dan masyarakat miskin, sehingga anggota UMKM dapat mengumpulkan sumber daya dan menjual dalam kuantitas yang lebih besar dan pada tingkat yang lebih tinggi dalam rantai nilai (misalnya pemrosesan dan pengemasan bahan mentah) kepada pembeli daerah dan nasional.

Uji coba keberantaraan pasar KOMPAK akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi COVID-19. Fokus yang lebih besar akan diberikan kepada BUMDES/BUMDESMA sebagai cara memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat desa dan menyediakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi anggota masyarakat. KOMPAK juga akan mendukung Bappenas dalam mendorong model keberantaraan pasar, sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, yang berfokus pada penguatan bukti elemen model keberantaraan pasar yang paling efektif dan cara mereplikasinya.

KOMPAK juga akan membantu Bappenas dan Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan Strategi Nasional Pengembangan UMKM di tahun 2021. Strategi ini diharapkan mencakup elemen penting dari pendekatan keberantaraan pasar, seperti mekanisme koordinasi, insentif untuk pengembangan sektor swasta, dan penggunaan dana hibah pemerintah untuk mendorong inovasi bisnis.

## KEMITRAAN

Bappenas menjadi kementerian utama, dengan dukungan tambahan diberikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa PDTT.

Bila perlu, KOMPAK akan bermitra dengan fasilitas yang didanai DFAT lainnya, seperti MAHKOTA. Pada tahun 2019, KOMPAK bermitra dengan PRISMA dan MAMPU untuk mengidentifikasi dan menguji coba inisiatif keberantaraan pasar.

Sebagai bagian dari uji coba, kemitraan dengan lembaga sektor swasta juga harus dikembangkan. Pada tahun 2020, KOMPAK berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai perusahaan nasional dan internasional, antara lain bantuan pembelian barang dan pengembangan *platform* keberantaraan pasar.

## KOMPONEN UNGGULAN

### TANTANGAN DAN PELUANG

KOMPAK bertujuan memperkuat model keperantaraan pasar dan mendorong replikasinya sebagai solusi bagi pemerintah daerah. Bappenas adalah pelaksana utama pendekatan ini dan telah menerapkannya dalam RPJMN 2020-2024. KOMPAK Juga akan membantu Bappenas dan Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan Strategi Nasional Pengembangan UMKM, yang menyertakan elemen dari pendekatan keperantaraan pasar. Ke depannya, agar model ini dapat semakin berhasil, KOMPAK akan mengupayakan untuk:

- Meningkatkan profitabilitas dan insentif untuk kolaborasi dengan perantara. Dasar dari kegiatan pengembangan ekonomi daerah adalah terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. KOMPAK akan berfokus pada peningkatan pendapatan dan keuntungan UMKM, menciptakan dan menunjukkan manfaat bagi perantara dalam menciptakan keterkaitan antara kelompok usaha daerah dan pemasok, dan mengidentifikasi pendekatan yang paling efektif. Terdapat tantangan dalam hal informasi yang asimetris: terbatasnya informasi tentang peluang ekonomi daerah yang tersedia bagi perantara dan kelompok usaha daerah yang menjadi sasaran penjualan produk. Pendekatan keperantaraan pasar, KOMPAK, dan pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan hubungan ini.
- Memberikan fokus yang lebih besar kepada kelompok rentan dan perempuan. Uji coba yang dilakukan belum menunjukkan manfaat khusus bagi perempuan dan kelompok rentan, dan ini sangat penting sebelum semakin banyak pemerintah daerah mengadopsi pendekatan ini.
- Meningkatkan standardisasi dan replikasi model. Model ini telah terbukti keberhasilannya di beberapa wilayah, tetapi mereplikasi keberhasilan ini tidaklah mudah. KOMPAK berusaha mengidentifikasi hasil pembelajaran dan formula kesuksesan yang dapat diterapkan di desa lain yang memiliki peluang usaha serupa. Replikasi juga akan dilakukan dengan pengintegrasian model keperantaraan pasar ke dalam program kerja Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Koperasi dan UKM.
- Memperkuat bukti efektivitas pendekatan ini. Diperlukan evaluasi yang ketat dan sistem pemantauan yang kuat untuk membantu para pengambil keputusan memahami efektivitas model ini dan situasi terbaik untuk menggunakannya. KOMPAK telah mengembangkan pendekatan baru untuk pemantauan, tetapi pendekatan ini belum mampu menangkap dan menilai manfaat lanjutan untuk penerima manfaat sekunder, seperti petani.
- Meningkatkan keterhubungan dengan model dan pendekatan KOMPAK lainnya. KOMPAK membantu di lima kegiatan unggulan lainnya dan ada bidang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat model keperantaraan pasar, antara lain penggunaan dana desa dan kabupaten atau alat Pengelolaan Keuangan Publik untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal, mengintegrasikan elemen sistem informasi desa untuk mendukung kelompok bisnis dan perencanaan pengembangan ekonomi, serta memanfaatkan fasilitator PTPD sebagai alat untuk mendukung kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal.

- KOMPAK tidak lagi mengembangkan platform daring dan telah beralih ke kolaborasi dengan platform yang ada, seperti Ekosis dan TaniHub, untuk mendorong keterhubungan antara UMKM dan berbagai pelaku penunjang, antara lain pembeli, lembaga keuangan, dan perusahaan logistik. KOMPAK telah mendorong penggunaan platform ini (melalui webinar) kepada pemerintah daerah dan UMKM, dan di tahun 2021, KOMPAK akan berusaha memperkuat keterhubungan antara perusahaan yang mengelola platform ini dan pemerintah daerah serta UMKM, melalui kunjungan lapangan dan kolaborasi.

## 6.1 Menyelesaikan implementasi dan dokumentasi uji coba model Keperantaraan Pasar

### Sasaran

Anggaran yang dimanfaatkan sebagai sumber daya tambahan untuk mendukung pengembangan ekonomi lebih besar dibandingkan anggaran yang diinvestasikan dalam pendekatan Keperantaraan Pasar dari KOMPAK	Pada 2022, semua kelompok usaha yang didukung pendekatan keperantaraan pasar memperoleh laba	Pada 2022, tujuh kabupaten telah mengadopsi dan melembagakan pendekatan keperantaraan pasar untuk meningkatkan peluang ekonomi yang melampaui komoditas awal	Pada tahun 2021, 1000 perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat mengakses peluang ekonomi melalui pendekatan keperantaraan pasar
---	--	--	--

### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu pemerintah daerah memperkuat perannya dalam model keperantaraan pasar (mis. mengidentifikasi komoditas potensial, melakukan analisis rantai nilai, menghubungkan UMKM dengan <i>offtakers</i> atau pembeli)	Daerah	Bappenas	Membantu pemerintah daerah (penyedia layanan atau gugus tugas) memahami dan menjalankan peran mereka dalam keperantaraan pasar (termasuk dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan); menyelesaikan implementasi proyek uji coba yang sedang berlangsung

## 6.2 Mengembangkan instrumen dan model bisnis nasional untuk mendukung keberlanjutan model/pendekatan Keperantaraan Pasar

### Sasaran

Memperkuat bukti dan masukan kebijakan tentang pendekatan keperantaraan pasar untuk mendukung Bappenas

### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Membantu Bappenas dan pemerintah daerah menyusun panduan/ <i>how-to</i> praktis cara mempertahankan/mereplikasi model dan memberikan rekomendasi untuk draf Strategi Nasional tentang Pengembangan UMKM	Nasional	Bappenas	Rekomendasi kebijakan untuk Strategi Nasional berdasarkan evaluasi dan dokumentasi proyek uji coba
			Rekomendasi teknis untuk mengintegrasikan model keperantaraan pasar ke dalam program kerja Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Desa PDTT
			Mengembangkan alat/panduan dan memperkenalkan platform keperantaraan pasar
			Melakukan evaluasi dan mendokumentasikan hasil pembelajaran



# 07. LINTAS SEKTOR

## KEGIATAN UNGGULAN

**\$4,8 JT**

Anggaran untuk kegiatan unggulan dari Jan 2021 hingga Jun 2022

**39%**

Persentase total anggaran kegiatan KOMPAK

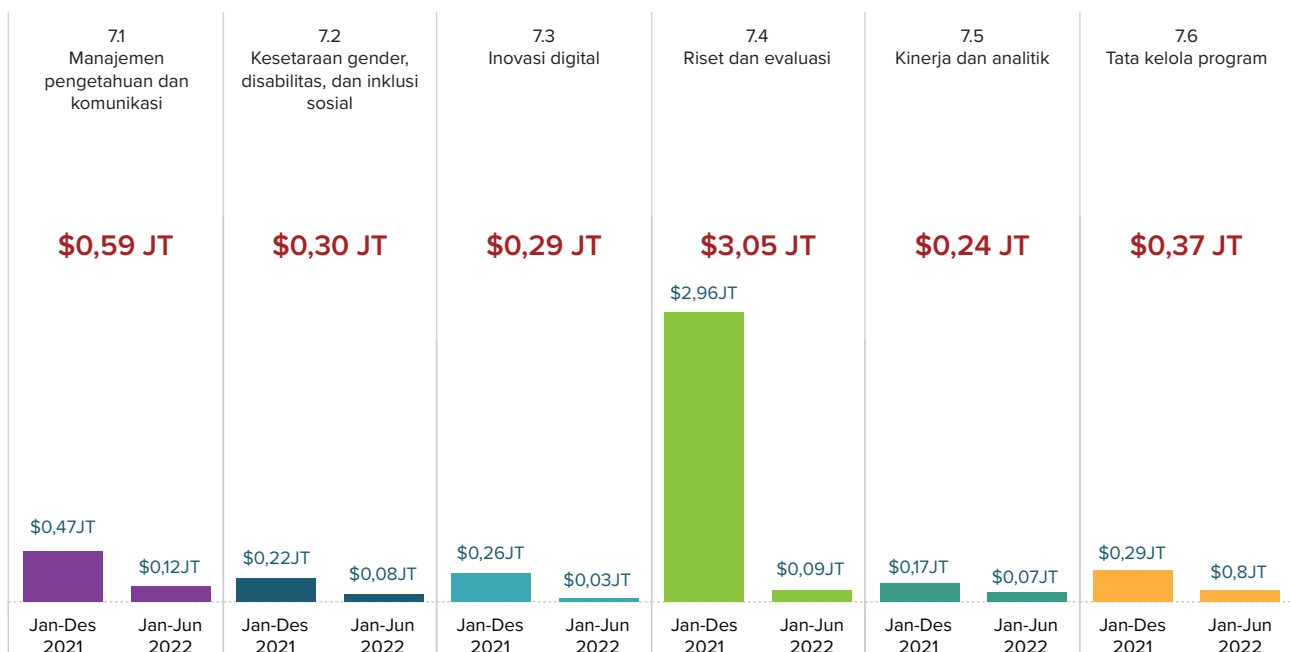
**4%**

Persentase anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan daerah

**43**

Jumlah kegiatan unggulan

## KOMPONEN UNGGULAN



## 7.1 Manajemen pengetahuan dan komunikasi

Strategi Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi KOMPAK akan memandu kegiatan advokasi dan komunikasi KOMPAK. Titik beratnya adalah membantu tim program mendokumentasikan, menyebarluaskan, dan mengadvokasi perubahan penting dan model yang telah terbukti setelah KOMPAK selesai beroperasi.

Pada kuartal pertama tahun 2021, KOMPAK akan menyelenggarakan lokakarya untuk masing-masing kegiatan unggulan dan mengonfirmasi model prioritas untuk advokasi, mengidentifikasi kesenjangan dan bidang kolaborasi (khususnya dengan program DFAT lainnya), menilai kapasitas dan dukungan pemangku kepentingan, dan menentukan masalah kritis. Kemudian, akan disusun rencana advokasi yang lebih rinci, yang didasarkan pada Strategi Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi.

Selain itu, KOMPAK melibatkan lembaga komunikasi untuk mendukung implementasi kegiatan komunikasi eksternal dan manajemen pengetahuan. Lembaga ini akan membantu menyelenggarakan acara dan publikasi yang mendorong pertukaran pengetahuan dan hasil pembelajaran.

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Pendokumentasian dan penyebarluasan produk pengetahuan, praktik terbaik, pencapaian, dan hasil pembelajaran (studi kasus/kisah, video, dan foto)	Nasional	Bappenas	Mendokumentasikan praktik terbaik, perubahan, dan hasil pembelajaran melalui studi kasus/kisah, video, dan foto
			Mengelola situs web
			Menerbitkan dan menyebarkan buletin
			Mengembangkan konten media sosial
Kampanye manajemen pengetahuan dan komunikasi untuk mendukung advokasi (untuk pelembagaan dan replikasi)	Nasional	Bappenas	Mengembangkan dan melaksanakan rencana kampanye manajemen pengetahuan dan komunikasi (kegiatan non-acara/ <i>non-event</i> )
			Mengelola dan menyelenggarakan acara untuk mendukung advokasi (forum berbagi pengetahuan, acara webinar dan pameran, antara lain konferensi Inspirasi)
			Mengelola kegiatan pelibatan media (kunjungan media, briefing media, penyebarluasan siaran pers, pemantauan media)
Sesi berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dan hasil pembelajaran dari kegiatan unggulan KOMPAK	Nasional	Bappenas	Melaksanakan sesi berbagi pengetahuan dan pembelajaran dari pemerintah untuk pemerintah
			Menyelenggarakan sesi berbagi tentang praktik terbaik KOMPAK kepada Abt Australia ( <i>Global Market Centre</i> )
Pengembangan dan penyebarluasan produk komunikasi dan pengetahuan	Nasional	Bappenas	Pemutakhiran kanal pengetahuan internal (WIKI, perpustakaan daring, dan <i>Monthly Knowledge Update</i> )
		Bappenas	Membantu desain, tata letak, penyuntingan, penerjemahan, dan kendali mutu dari produk pengetahuan (misalnya ringkasan kebijakan, panduan teknis, laporan penelitian, panduan replikasi, produk pembelajaran, dll.)
		Bappenas	Menyusun konten dan menerbitkan materi komunikasi (seperti lembar fakta dan materi promo lainnya)
		Bappenas	Menyebarkan produk pengetahuan ke Perpustakaan Nasional dan perpustakaan mitra pemerintah atau universitas (termasuk pendaftaran kode ISBN)

## 7.2 Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial

KOMPAK akan membantu pemerintah meningkatkan penyediaan layanan dasar dan bantuan sosial yang inklusif. Fokusnya adalah penguatan bukti dan sumber daya kebijakan mengenai dinamika kerentanan dan kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI). KOMPAK juga akan terlibat untuk membantu Pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan dan program yang dapat mengatasi penghambat inklusi dan peluang untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 secara lebih efektif.

Dalam 18 bulan ke depan, KOMPAK akan fokus pada pengarusutamaan GESI, sedangkan intervensi khusus GESI telah diserahkan dan dihentikan pada tahun 2020. Contohnya: Model Akademi Paradigta telah direplikasi di luar wilayah KOMPAK, sementara hasil pembelajaran dari implementasi program digunakan untuk mengembangkan panduan nasional mengenai fasilitasi pemberdayaan wanita di tingkat desa, yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT.

Pengarusutamaan gender berpegang pada penyertaan persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan ketertarikan perempuan dan laki-laki dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Secara praktis, model dan pendekatan yang didukung KOMPAK harus terus-menerus dikaji dan diadaptasi agar perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok termarginalisasi dapat terlibat dengan cara-cara yang bermakna.

Sebagian besar kegiatan yang dijabarkan di bawah ini melibatkan bantuan teknis, penelitian, dan advokasi. Kesemuanya menyempurnakan kegiatan unggulan yang telah ada, seperti membantu pemerintah daerah meningkatkan partisipasi dan suara kaum perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan desa dan penganggaran, serta mampu memantau dan meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk menyediakan prioritas yang telah disepakati. KOMPAK juga akan melaksanakan kajian khusus yang melihat dampak COVID-19 terhadap kerentanan dan akses ke layanan, dan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menerapkan perubahan untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi dan penurunan ekonomi.

Pada bulan November 2020, *Independent Strategic Advisory Team (ISAT)* menyertakan seorang Spesialis GESI, yang mengkaji aspek GESI dari kegiatan KOMPAK. ISAT menyimpulkan bahwa:

“Ada kemajuan pesat di bidang kesetaraan gender dan inklusi sosial karena kini GESI disertakan dalam perancangan, implementasi, anggaran, dan proses monitoring dan evaluasi KOMPAK. Pandemi tampaknya telah menciptakan ruang diskusi mengenai GESI dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. KOMPAK bersama mitranya telah berperan aktif dalam memfasilitasi dialog ini, baik secara nasional maupun di daerah. Namun, masih perlu penyelarasan kegiatan KOMPAK dengan kerangka kerja nasional agar mitra pemerintah dapat lebih menggunakan metodologi yang dikembangkan KOMPAK.”

“Bagi ISAT, KOMPAK perlu lebih berfokus pada pengarusutamaan dimensi GESI kegiatannya ke dalam sistem pemerintahan yang telah ada, di tingkat desa, kabupaten, dan nasional, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran.”

## Rekomendasi ISAT (terkait GESI)

REKOMENDASI ISAT	TANGGAPAN DAN TINDAKAN KOMPAK
<p><b>Rekomendasi 7:</b> KOMPAK harus terus meningkatkan pengumpulan dan penerapan data GESI yang teragregasi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyertakan kapasitas dan pencarian sumber daya dalam pengumpulan data GESI secara rutin serta pengelolannya ke sistem yang telah ada.</p> <p><b>Rekomendasi 9:</b> KOMPAK perlu memastikan bahwa rencana kerja tahunan 2021 berfokus pada penyelarasan yang lebih baik antara intervensi GESI dan kerangka kerja serta sistem mitra pemerintah yang sudah ada agar para mitra dapat lebih mudah untuk melaksanakan pendekatan ini.</p>	<p>KOMPAK akan menjajaki cara membantu pemerintah daerah dalam mempertahankan data GESI di sistem yang telah ada (seperti SID) dan pelaporan indikator kinerja GESI (menggunakan indikator Pemerintah Indonesia/Bappenas sebagai panduan, dengan fokus pada kegiatan musrenbang khusus/inklusif).</p> <p>KOMPAK juga akan menyelidiki perubahan di tingkat masyarakat yang terjadi akibat intervensi GESI dan membawanya dalam diskusi tingkat makro/kebijakan dengan program terkait lainnya. Oleh karenanya, KOMPAK akan terus bekerja sama dengan program lain dalam manajemen pengetahuan dan kegiatan lintas pembelajaran terkait GESI.</p> <p>Selain itu, KOMPAK akan berfokus pada pelembagaan praktik GESI ke dalam sistem pemerintahan sebagai bagian dari rencana kerja ini, khususnya kegiatan yang terkait perencanaan dan penganggaran inklusif.</p>

## Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	KEGIATAN UNGGULAN	SUB-KEGIATAN
Advokasi dan dukungan teknis terkait GESI	Nasional	Bappenas	Penguatan Kecamatan dan Desa	Dukungan teknis bagi kabupaten dan desa dalam penyelenggaraan Musyawarah Khusus perempuan dan kelompok rentan melalui kajian sebagai bahan penyusunan panduan untuk disebarluaskan
		Bappenas	SID	Masukan teknis tentang penggunaan data kelompok rentan dalam sistem informasi desa untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan desa
		Bappenas	Pengembangan Ekonomi Lokal	Masukan teknis analisis GESI demi meningkatkan keterlibatan kelompok rentan dalam pengembangan ekonomi lokal
		Bappenas	Lintas Sektor	Advokasi tentang pendekatan pengembangan GESI yang sensitif dan inklusif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait
Analisis GESI	Nasional	Bappenas	Lintas Sektor	Studi dampak sensitivitas gender dan pendekatan inklusif di semua intervensi KOMPAK
		Bappenas	Lintas Sektor	Studi dampak COVID-19 terhadap kelompok rentan (penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak, berkolaborasi dengan tim Peneliti)

## 7.3 Inovasi digital

### Tantangan dan peluang

- KOMPAK telah menguji coba aplikasi dan dasbor seluler untuk memantau ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, dan bayinya, melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan SEHATI, suatu perusahaan teknologi kesehatan swasta. Untuk menilai efektivitas uji coba dan potensi penskalaannya, KOMPAK akan memfasilitasi evaluasi independen di tahun 2021. Evaluasi ini akan menilai seberapa efektif aplikasi ini dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan keberlanjutan model ini. Tantangan utama dalam jangka panjang adalah keberlanjutan, karena masih belum jelas apakah pemerintah daerah akan melanjutkan pendanaan sistem ini setelah KOMPAK tidak beroperasi lagi.
- Pada akhir 2019, KOMPAK mulai bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital. Saat pandemi melanda, KOMPAK dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyadari perlunya mendapatkan data penerima bantuan sosial yang akurat, yang dapat diperiksa silang dengan mereka yang memerlukan layanan ini. Dasbor dan sistem pendukung yang dihasilkan, yang dikenal sebagai Bansos 360, kini sudah beroperasi tetapi perlu diimigrasi ke ekosistem Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) kabupaten.

### Rencana kerja

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT	MITRA	SUB-KEGIATAN
Evaluasi aplikasi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) bagi ibu hamil	Nasional dan daerah	Bappenas	Penyusunan laporan evaluasi aplikasi seluler PWS dan uji coba dasbor
Melanjutkan uji coba kabupaten digital untuk membantu penyaluran bantuan sosial	Nasional dan daerah	Bappenas	Bantuan dalam pengembangan dan pengelolaan Bansos 360 tahap 1, 2, dan 3
		Bappenas	Evaluasi percobaan Kabupaten Digital (berfokus pada Bansos 360)

## 7.4 Riset dan evaluasi

Dalam tahap terakhir KOMPAK, pendokumentasian hasil semakin diperlukan untuk menjadi bukti yang menunjukkan efektivitas model yang diuji coba dan bantuan teknis yang diberikan. Dokumentasi hasil ini akan menjadi bukti bagi KOMPAK dan mitranya untuk menjadi landasan pembangunan dan keberlanjutan, advokasi dalam penskalaan dan replikasi, serta untuk membantu penyusunan dokumen serah terima program ke mitra pemerintah.

Agenda riset dan evaluasi KOMPAK disusun setelah berkonsultasi dengan Bappenas. Agenda ini didasarkan pada empat bidang fokus:

1. Mendokumentasikan kontribusi KOMPAK dalam membantu pemerintah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah;
2. Mengkaji efektivitas kegiatan KOMPAK dalam mencapai hasil yang diinginkan;
3. Menjajaki nilai tambah fasilitas seperti KOMPAK dalam mendukung tujuan pengentasan kemiskinan Pemerintah (dibandingkan dengan program biasa); dan
4. Menganalisis dan memberikan wawasan tentang lingkungan sosial ekonomi di wilayah KOMPAK.

Agenda riset dan evaluasi, sebagaimana dirangkum di bawah ini, merupakan dokumen hidup yang terus dimutakhirkan saat tim bekerja sama dengan unit lain untuk menanggapi kebutuhan yang baru muncul.

## Rencana kerja

SUB-KEGIATAN	KEGIATAN UNGGULAN	PERINCIAN	WAKTU
<b>Evaluasi model/pendekatan utama KOMPAK</b>			
Peran kecamatan dalam Penguatan Pemerintah Desa melalui Model PTPD (Kajian PTPD)	Penguatan Kecamatan dan Desa	<p><b>Tujuan:</b> (i) mengidentifikasi peran Kecamatan setelah penerapan model PTPD, khususnya dalam bidang penguatan tata kelola desa; (ii) mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi implementasi; dan (iii) memahami perspektif pemangku kepentingan mengenai peran PTPD dalam memfasilitasi tata kelola desa (yaitu pejabat desa, kecamatan, dan kabupaten).</p> <p><b>Metodologi:</b> Kualitatif (wawancara mendalam), analisis data proyek.</p> <p><b>Peneliti:</b> Konsultan individu.</p> <p><b>Cakupan:</b> Semua kabupaten KOMPAK untuk dokumentasi, kabupaten terpilih (Bantaeng, Pekalongan, Bima) untuk menyelami lebih dalam.</p>	<p>Dilanjutkan dari 2020</p> <p>Rencana terbit: Feb/Mar 2021</p>
Kemajuan Hasil Kabupaten dan Alat Pengelolaan Keuangan Publik	Pengelolaan Keuangan Publik	<p><b>Tujuan:</b> (i) mengidentifikasi hasil pencapaian Kabupaten KOMPAK setelah 5 tahun melalui indikator sosial ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Publik; (ii) membandingkan kemajuan antara kabupaten KOMPAK dan bukan KOMPAK; dan (iii) menganalisis/memetakan peran strategis Alat Pengelolaan Keuangan Publik yang didukung KOMPAK dalam membantu pemerintah kabupaten mencapai hasil yang lebih baik.</p> <p><b>Metodologi:</b> Kualitatif.</p> <p><b>Peneliti:</b> Konsultan individu.</p> <p><b>Cakupan:</b> Belum ditentukan (5 provinsi, masing-masing 2 kabupaten).</p>	<p>Dilanjutkan dari 2020</p> <p>Rencana terbit: Apr 2021</p>
Evaluasi Sistem Data Digital Desa (DMD/SID) dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran di Desa	SID	<p><b>Tujuan:</b> memahami apakah SID/DMD yang ada digunakan dalam perencanaan dan penganggaran dan apakah hasilnya meningkatkan kualitas dan keinklusan proses. Hasil analisis cepat ini akan digunakan sebagai dasar penguatan/pengembangan SID/DMD di wilayah KOMPAK dan wilayah lainnya. Evaluasi ini juga akan berkontribusi pada agenda Bappenas mengenai Evaluasi Inisiatif DMD (kuantitatif).</p> <p><b>Metodologi:</b> Kuantitatif dengan metode <i>difference-in-differences</i>.</p> <p><b>Peneliti:</b> Konsultan individu.</p> <p><b>Cakupan:</b> Semua kabupaten KOMPAK.</p>	Feb – Okt 2021

SUB-KEGIATAN	KEGIATAN UNGGULAN	PERINCIAN	WAKTU
Evaluasi Dampak COVID-19 terhadap Tata Kelola dan Pembangunan Desa	Penguatan Kecamatan dan Desa	<p><b>Tujuan:</b> mengidentifikasi sejauh mana pandemi COVID-19 berdampak pada kegiatan tata kelola dan pembangunan desa, serta bagaimana pemerintah desa menanggulangi pandemi tersebut.</p> <p><b>Metodologi:</b> Kualitatif.</p> <p><b>Peneliti:</b> Perusahaan penelitian.</p> <p><b>Cakupan:</b> Belum ditentukan (5 provinsi, masing-masing 2 kabupaten).</p>	Mar – Des 2021
Evaluasi Penguatan Akuntabilitas Sosial di Desa	Akuntabilitas Sosial	<p><b>Tujuan:</b> (i) memahami apakah model akuntabilitas sosial KOMPAK berhasil membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan desa (yaitu semakin baiknya kecocokan antara kebutuhan dan alokasi anggaran dengan memperhitungkan kebutuhan dari berbagai segmen masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan); dan (ii) menganalisis/memetakan langkah/tahap kunci, pemain yang terlibat, dan dinamika sosial politik setempat yang memengaruhi proses akuntabilitas sosial.</p> <p><b>Metodologi:</b> Metode campuran.</p> <p><b>Cakupan:</b> Belum ditentukan (dipilih dari 33 desa yang menerapkan Sekar Desa).</p> <p><b>Peneliti:</b> Perusahaan(-perusahaan) peneliti.</p> <p><b>Potensi kolaborasi:</b> Bank Dunia (untuk membantu pelembagaan model AS KOMPAK melalui P3PD).</p>	Apr 2021 – Feb 2022
Evaluasi kapasitas pejabat pemerintah desa	Penguatan Kecamatan dan Desa	<p><b>Tujuan:</b> menilai peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam menyediakan layanan bagi masyarakat desa di wilayah KOMPAK sebagai hasil dari penerapan PKAD (antara lain PTPD dan PbMAD) dan untuk memahami faktor utama yang memengaruhi peningkatan kapasitas tersebut.</p> <p><b>Metodologi:</b> Kualitatif.</p> <p><b>Cakupan:</b> Belum ditentukan (5 provinsi, masing-masing 2 kabupaten).</p> <p><b>Peneliti:</b> Perusahaan peneliti.</p> <p><b>Potensi kolaborasi:</b> Bank Dunia (untuk membantu replikasi PKAD melalui P3PD).</p>	Mar – Des 2021

SUB-KEGIATAN	KEGIATAN UNGGULAN	PERINCIAN	WAKTU
Evaluasi Model KOMPAK di Papua and Papua Barat	Lintas Sektor	<p><b>Tujuan:</b> (i) mengidentifikasi efektivitas model KOMPAK di Papua dan Papua Barat; (ii) menganalisis faktor yang berkontribusi pada pencapaian sasaran; dan (iii) mengidentifikasi hasil pembelajaran dan apa yang dapat dilakukan secara berbeda untuk program pembangunan/tata kelola lain di Papua dan Papua Barat.</p> <p><b>Metodologi:</b> Metode campuran.</p> <p><b>Cakupan:</b> Belum ditentukan (desa terpilih di Papua dan Papua Barat).</p> <p><b>Peneliti:</b> Perusahaan peneliti.</p> <p><b>Potensi kolaborasi:</b> BPS (penyediaan kerangka sampel SUSENAS 2021 dan potensi kolaborasi dalam analisis data).</p>	Feb – Des 2021
<b>Analisis mengenai pelembagaan model utama KOMPAK</b>			
Analisis Anggaran Desa 2020 dan 2021	Pengelolaan Keuangan Publik, Penguatan Kecamatan dan Desa	<p><b>Tujuan:</b> (i) menganalisis belanja desa di wilayah sasaran KOMPAK saat ada penambahan alokasi anggaran untuk layanan dasar (pendidikan dan kesehatan); dan (ii) menjajaki faktor yang memengaruhi dan mendorong pergeseran pola belanja di tingkat desa. Sebagai tambahan, analisis 2020 secara khusus bertujuan untuk mencatat bagaimana pemerintah desa menyesuaikan alokasi anggarannya untuk menghadapi Pandemi COVID-19.</p> <p><b>Metodologi:</b> Kuantitatif.</p> <p><b>Peneliti:</b> Konsultan individu.</p> <p><b>Cakupan:</b> Semua desa KOMPAK.</p>	Dilanjutkan dari 2020 untuk analisis 2021  Rencana terbit: Okt 2021 dan Mei 2022
Analisis Mengenai Pelembagaan Model KOMPAK (mis. PASH, Penguatan Kecamatan dan Desa, DID)	PASH, Penguatan Kecamatan dan Desa, Pengelolaan Keuangan Publik	<p><b>Tujuan:</b> mendokumentasikan penerapan dan pelembagaan beberapa pendekatan KOMPAK.</p> <p><b>Metodologi:</b> Kualitatif.</p> <p><b>Peneliti:</b> Konsultan individu.</p> <p><b>Cakupan:</b> Kabupaten terpilih dan tingkat nasional.</p>	Dilanjutkan dari 2020  Rencana terbit: Apr-Jun 2021
Analisis Politik Ekonomi Kebijakan dan Advokasi KOMPAK	Lintas Sektor	<p><b>Tujuan:</b> mendokumentasikan dan mengevaluasi pendekatan KOMPAK dalam penerapan uji coba, penskalaan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan; dan memahami konteks politik ekonomi yang memengaruhi upaya membawa perubahan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.</p> <p><b>Metodologi:</b> Metode campuran.</p> <p><b>Peneliti:</b> Konsultan individu.</p> <p><b>Cakupan:</b> Belum ditentukan (kabupaten terpilih dan tingkat nasional).</p>	Feb – Jul 2021



## 7.5 Kinerja dan analitik

Pendekatan kinerja KOMPAK telah dijelaskan di bagian awal rencana kerja ini. KOMPAK berupaya memperkuat narasinya secara lebih luas, khususnya melalui pergeseran budaya lembaga yang berfokus pada hasil alih-alih keluaran. Ini adalah prioritas dan tantangan yang terus-menerus yang diatasi melalui pendekatan baru terhadap kinerja (misalnya penggunaan sasaran dan indikator SMART 2022) serta penekanan yang lebih besar pada penelitian evaluatif dan kualitatif (seperti penyusunan makalah 'hasil kegiatan unggulan', berusaha memperbaiki keterkaitan antar kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak luasnya.

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT
Melaksanakan Penilaian Kinerja di tingkat nasional dan daerah dalam jangka waktu 6 bulan	Nasional dan daerah
Membantu kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran di tingkat nasional dan daerah, termasuk kegiatan Survei KOMPAK	Nasional dan daerah
Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk membantu perencanaan, pelaporan, dan pembelajaran program KOMPAK	Nasional
Membantu penyusunan laporan 6-bulanan KOMPAK	Nasional
Melaksanakan 6 rapat Tim Kinerja bulanan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional dan daerah	Nasional dan daerah

## 7.6 Tata kelola program

Komponen ini menyediakan sumber daya bagi rapat Komite Pengarah dan Komite Teknis KOMPAK serta badan koordinasi daerah yang setara. Komponen ini penting demi memastikan keselarasan antara KOMPAK dan prioritas pemerintah.

KEGIATAN UTAMA	TINGKAT
Bantuan dalam rapat koordinasi teknis di tingkat Nasional	Nasional
Bantuan dalam rapat koordinasi teknis di tingkat Daerah (termasuk dua Misi Pengawasan Bersama)	Daerah

## LAMPIRAN:

# KOMPONEN RENCANA KERJA TAHUNAN

Dokumen ini memberikan ikhtisar kegiatan utama dan metrik kinerja dari Januari 2021 hingga Juni 2022. Perincian lebih lanjut dari masing-masing kegiatan unggulan dan lintas sektor dapat ditemukan pada lampiran berikut:

- 1. Anggaran Rencana Kerja:** Anggaran rencana kerja adalah ringkasan teragregasi dari daftar kegiatan berbayar terperinci dari SIM. Anggaran ini menetapkan batas atas investasi KOMPAK yang dipisahkan berdasarkan kegiatan dan komponen unggulan.
- 2. Sasaran dan Kerangka Kerja Indikator:** Kerangka kerja ini menjabarkan sasaran dan indikator. Setiap indikator berkontribusi pada pengukuran keberhasilan menuju komponen unggulan terkait.
- 3. Daftar kegiatan dan keluaran terperinci:** Dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) KOMPAK, terdapat rencana kerja terperinci dengan serangkaian kegiatan berbayar terperinci yang dihubungkan dengan kabupaten, direktorat, pejabat yang bertanggung jawab, dan keluaran. Kemajuan terhadap rencana kerja akhir ini akan dinilai enam bulan sekali untuk setiap kegiatan melalui proses Penilaian Kinerja.



